

Pakistan
Khilafah
and the re-unification of the
Muslim World

MANIFESTO HIZBUT TAHRIR UNTUK PAKISTAN

Pakistan, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Muslim

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MANIFESTO HIZBUT TAHRIR UNTUK PAKISTAN

Pakistan, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Muslim

Terjemah Bahasa Inggris ke Indonesia: Annas I. Wibowo

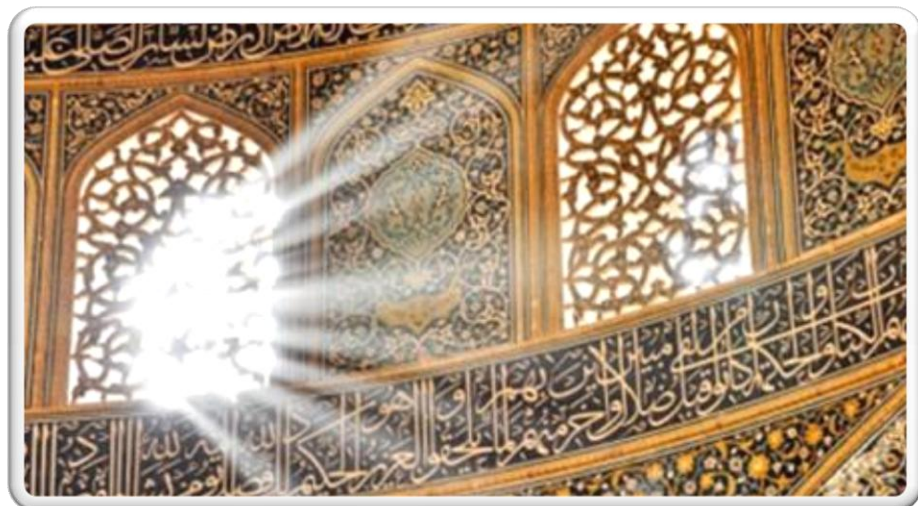


Pakistan, Khilafah and the re-unification of the Muslim World

Hizb ut Tahrir Wilayah Pakistan

Sebarkan buku ini. Semoga bermanfaat sebesar-besarnya. Aamiin, ya Rahman Swt.

Isi





Pendahuluan

Pakistan – Titik mula untuk Khilafah

Pakistan, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Muslim

Meski totalnya memiliki lebih banyak daratan, laut, tentara, sumberdaya material dan pemuda-pemudi berkemampuan daripada bangsa manapun di muka bumi, Kaum Muslimin mendapati diri mereka sendiri terpecah-belah ke dalam lebih dari 60 negara, dengan kemampuan dan kendali yang lebih kecil atas berbagai urusan mereka daripada bangsa-bangsa lain yang sangat kecil yang susah dilihat di peta dunia.

Pakistan tidak terkecuali. Meskipun mempunyai angkatan bersenjata terbesar ke-7 dunia, kemampuan nuklir, populasi terbesar ke-6 di dunia, pertanian yang kaya dan beragam, sumber-sumberdaya mineral cukup besar, ia dalam kondisi menghamba pada kemauan para kolonialis, tidak mampu memenuhi potensi real-nya.

Problem fundamental yang menjangkiti Ummat hari ini adalah bahwa kedaulatan Allah Swt. tidak ditegakkan di dalam kehidupan Kaum Muslimin. Sesungguhnya, jika satu atau lebih negeri Muslim muncul sebagai negara Khilafah yang di dalamnya Islam diterapkan, ini akan menjadi titik mula yang kuat bagi penyatuan-kembali seluruh Dunia Muslim sebagai negara paling kuat.

Problem mendasar ini telah mengakibatkan banyak masalah parsial, seperti: kemiskinan, buta huruf, ketidakstabilan politik, korupsi, nepotisme, kurangnya persatuan, konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang, dominasi para kolonialis atas sumberdaya, penjajahan tanah-tanah kita dan penyebaran tindakan-tindakan amoral.

Adalah nyata, selama 6 dekade, siapapun yang berkuasa di Pakistan, melalui pemilihan demokratis maupun kudeta militer, absennya Islam mengakibatkan penderitaan dan kesulitan. Allah Swt. mengklarifikasi penyebab utamanya,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit" [Terjemah Makna Qur'an Surat (20) Thaha 124]

Kegagalan kediktatoran dan demokrasi tidaklah terhindarkan karena keduanya memberikan kepada manusia hak untuk menentukan apa yang Halal dan Haram, bukannya Allah Swt. Jadi, perkara-perkara yang jelas haram di dalam Islam dan mengundang kemurkaan Allah Swt. atas Kaum Muslimin, seperti terlibat Riba (bunga), mendorong ketidaktaatan dan bekerja sama dengan kaum kafir melawan Kaum Muslim, menjadi dibolehkan di dalam sistem saat ini. Inilah juga mengapa perkara-perkara yang jelas fardhu (wajib), seperti menerapkan Hudud Allah Swt., mengirim angkatan bersenjata untuk membebaskan Tanah-Tanah Islam yang dijajah, mengamankan darah suci Kaum Muslim, melindungi Aqidah Islam dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok, terus tertunda.

Inilah mengapa Kaum Muslimin menyaksikan apa yang diperintahkan Allah Swt. dan RasulAllah Saw. diabaikan oleh para penguasa sekarang, sementara apa yang dilarang oleh Islam terus dipaksakan atas leher-leher Kaum Muslimin.

Hanya Islam yang akan membangkitkan Kaum Muslimin

Sistem di Pakistan saat ini tidak pernah bisa berhasil karena ia bertentangan dengan keyakinan Kaum Muslimin sendiri. Sistem sekarang terus-menerus menyingkirkan Kaum Muslim dari miliknya yang paling berharga, kecintaannya terhadap Deen (agama) Allah Swt.

Hanyalah ketika keyakinan Kaum Muslimin bersesuaian secara sempurna dengan sistem yang diterapkan atas mereka, akan terdapat sinergi produktif dan picuan kedinamisan di dalam Umat. Islam meninggikan masyarakat yang tak tertandingi kehebatannya oleh peradaban manapun sebelumnya. Selama lebih dari 1 milenium, bermula sejak hari RasulAllah Saw. mendirikan negara Islam pertama kali di Al Madinah Al-Munawwarah, Kaum Muslimin menjadi mercusuar bersinar untuk seluruh umat manusia.

Mengenai hukum dan ketertiban, keamanan dan perlindungan atas minoritas, orang-orang yang tertindas menemukan tempat berlindung di dalam wilayah negara Khilafah, sebagaimana para Yahudi yang lari dari penindasan di Spanyol di abad ke-15 yang mereka disambut terbuka dan diberi kediaman oleh Khalifah Beyazid Ath-Thaani. Tanah-tanah Islam adalah rumah bagi orang-orang berbagai kepercayaan, ras dan bahasa yang semuanya mendapat manfaat dari keadilan dan keamanan yang hanya Islam yang bisa menyediakan. Memanglah, Negara Islam berhasil memupuk loyalitas yang hingga para Tentara Salib menemukan diri mereka sendiri harus berperang melawan orang-orang Kristen di Syam yang bergerak untuk mempertahankan negara mereka, negara Khilafah.

Kebangkitan, pengetahuan, dan kemakmuran Kaum Muslimin adalah monumen-monumen dalam warisan dunia. Dalam berbagai macam bidang seperti pengobatan dan astronomi, Khilafah tidaklah beberapa dekade tapi beberapa abad lebih maju dari negara-negara kontemporer. Ciri pria dan wanita terpelajar di Eropa dan kunci untuk harta karun teknologi adalah pengetahuan atas bahasanya Islam, Bahasa Arab. Selain itu, universitas-universitas Kaum Muslim adalah tujuan yang disukai bagi para pangeran dan putri Eropa.

Negara Khilafah memastikan akses ke kekayaan, tanpa terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Selama ratusan tahun berbagai kebutuhan dasar warganegara dijamin sementara memungkinkan mereka untuk mengejar kemakmuran lebih. Jadi, ada masa di mana di Afrika, Zakat tidak perlu didistribusikan. Di bawah, berabad-abad kekuasaan Muslim, Subbenua India telah menjadi kekaguman dunia.

Di panggung dunia, Khilafah adalah negara pemimpin selama berabad-abad, bahkan tanpa rival dekat. Ia menyatukan seabrek sumberdaya Kaum Muslimin di dalam satu, Negara Khilafah, yang membentang di 3 benua. Khilafah mendefinisi-ulang politik dunia menjadi didasarkan pada keadilan dan kebenaran dan ia menjadi kekaguman bangsa-bangsa. Berita-berita keadilan Kaum Muslimin menyusul setelah pembebasan tanah-tanahnya, sehingga orang-orang memasuki Deen Allah Swt. secara berbondong-bondong. Dan bila Kaum Muslimin tanahnya dijajah, bahkan oleh kekuatan luar biasa, seperti orang-orang Tartar dan Pasukan Salib, Kaum Muslimin tidak akan menyerah pada penjajahan mereka dan akan mengakhiri penjajahan mereka.

Sungguh ketika Kaum Muslimin dimuliakan dan dikuatkan oleh deen mereka, mereka adalah contoh terbaik yang pernah dilihat dunia. Allah Swt. berfirman,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah" [Terjemah Makna Qur'an Surat (3) Ali Imran 110]

Kedinamisannya bisa kembali lagi, inshaAllah, ketika Kaum Muslimin kembali kepada rahasia kesuksesan mereka di kehidupan ini dan berikutnya, yaitu adalah penerapan Islam secara komprehensif, melalui pendirian negara Khilafah di satu atau lebih negeri Muslim yang kuat sebagai titik mula bagi penyatuan-kembali seluruh Dunia Muslim.

Kewajiban mendirikan Islam sebagai jalan hidup

Hari ini, Kaum Muslimin berkewajiban atas keseluruhan Islam, sebagai Deen yang telah disempurnakan. Kaum Muslimin akan diminta pertanggungjawaban atas pengabaian apapun mengenai setiap hukum. Jadi mereka akan ditanyai tentang perlakuan mereka terhadap hukum-hukum perceraian, pernikahan, jual-beli, Jihad defensif untuk membebaskan tanah-tanah terjajah, puasa, sholat, Zakat, Hajj dan lain-lainnya.

Juga terdapat aturan-aturan yang penerapannya telah dipercayakan untuk Khalifah Kaum Muslimin dan tidak ada individu yang dibolehkan mengambil-alihnya, seperti keseluruhan hukum-hukum sanksi, hukum-hukum Jihad ofensif untuk menyebarkan Dakwah, hukum-hukum kepemilikan Negara dan hukum-hukum mengenai Khilafah. Terdapat aturan-aturan yang dipercayakan untuk Khalifah dan adalah kewajiban bagi Kaum Muslimin untuk mematuhinya dalam keadaan apapun.

Dengan mematuhi Islam secara komprehensif, Kaum Muslimin akan sekali lagi memeluk kehidupan Islam yang makmur. Kaum Muslimin lalu akan menikmati penghambaan kepada Allah Swt., sementara juga menyiapkan kemampuan materi untuk memimpin semua bangsa.

Hanyalah suatu otoritas yang memerintah dengan Islam secara eksklusif dan lengkap, Khilafah, yang mengemban perkara ini. Allah Swt. memerintahkan Kaum Muslimin secara tegas,

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu" [Terjemah Makna Qur'an Surat (5) Al Ma'idah 48]

Konsekuensinya, kehidupan di dalam Khilafah ada dalam keharmonisan total dengan keyakinan Kaum Muslimin. Islam telah mewajibkan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan seperti universitas, rumah sakit, pendirian pabrik, laboratorium, menyiapkan tenaga dan kekuatan. Kaum Muslimin secara bersama berbagi tanggung jawab mengamankan pemenuhan-pemenuhan itu, demi keridhoan Allah Swt.

Maka, dalam sistem pemerintahan, Negara didirikan dengan pilar-pilar yang digariskan oleh Syara', seperti Khalifah, mu'awinin (para asisten) wulaah (para gubernur), qudaah (para hakim), sistem administrasi dan majlis al-Ummah (Dewan Umat). Dalam sistem ekonomi, terdapat hukum-hukum Syar'i mengenai tanah dan kepemilikan, dan hukum-hukum lain mengenai produksi barang-barang dan industri, dan perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Dalam kebijakan luar negeri, angkatan bersenjata Islam dan penyiapannya adalah untuk merealisasi sasaran yang untuknyalah mereka diadakan, yaitu untuk menyebarluaskan da'wah Islam ke dunia.

Sang Pembuat Hukum (Allah) telah membebankan semua aturan itu dan aturan-aturan lain semacamnya pada Khalifah. Bukanlah kelompok melainkan Khalifah yang membawa tanggung jawab untuk mengurus mereka. Dan adalah tanggung jawab semua Muslim bahwa mereka menuntutnya atas pemenuhan berbagai tanggung jawab itu.

Khilafah – Kebutuhan Zaman

Khilafah yang sedang disodorkan dalam manifesto mewakili hal-hal berikut:

- Seorang Khalifah terpilih, yang akan memerintah hanya dengan Islam, bukannya berbagai dikte merusak dari kekuatan-kekuatan kolonialis.
- Para anggota Dewan Konsultatif, para laki-laki dan perempuan semua madzhab, ras dan bahasa yang akan menuntut Khalifah menurut Islam.
- Mahkamah Mazalim yang akan menuntut para jajaran penguasa di bawah Khalifah, termasuk Khalifah untuk bertanggung jawab terhadap penyimpangan apapun dari memerintah dengan Islam. Khalifah tidak punya hak untuk mendepak hakim yang sedang menghakimi kasus atasnya.
- Masyarakat yang memeluk semua warganegaranya, tanpa pandang agama, madzhab, jenis kelamin, bahasa atau ras.
- Penyatuan-kembali seluruh Dunia Muslim sebagai negara terkuat dunia, melalui kebijakan re-aneksasi progresif dan juga pembebasan semua Tanah Islam terjajah.
- Sistem ekonomi yang memberi semua warganegaranya akses dan insentif untuk mendapat kemakmuran lebih sementara menjamin berbagai kebutuhan pokok bagi yang kurang mampu.
- Industri berat yang mandiri, termasuk berbagai mesin produksi, mesin transportasi dan elektronik. Negara yang memastikan teknologi terdepan termasuk tenaga nuklir, tenaga matahari, listrik wireless, nanoteknologi dan perjalanan angkasa.
- Pembebasan dari perbudakan kepada kolonialisme dalam segala bentuknya, seperti utang berbunga atau kendali atas sumber-sumberdaya Muslim.
- Pendidikan gratis berstandar terdepan di dunia bagi semua warganegaranya, tanpa pandang agama, madzhab, kekayaan atau pengaruh.
- Negara yang memimpin seluruh dunia, membawa Islam ke seluruh dunia. Negara yang akan bertindak sebagai penolong bagi semua orang di dunia, dari Afrika hingga Amerika Selatan, yang sekarang ditindas oleh ketidakadilan kolonialisme kapitalis.

Sistem Pemerintahan

Ketundukan kepada Allah Swt., bukan penghambaan kepada manusia

Mengangkat seorang Khalifah adalah kewajiban (Fardu) atas semua Muslim:

Allah Swt. telah menjadikannya wajib atas Ummat Muslim untuk memerintah dengan hukum-hukum yang Allah Swt. wahyukan.

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." [Terjemah Makna Qur'an Surat (5) Al Ma'idah 48]

Khilafah adalah otoritas yang menerapkan Islam secara sempurna dan secara eksklusif. Maka, adalah kebutuhan bagi Kaum Muslimin untuk memiliki seorang Khalifah, yaitu seorang pemimpin Negara Khilafah dan menerapkan semua hukum Islam. Pendirian Negara Khilafah adalah kewajiban, dan pengabaian apapun dalam penerapannya adalah dosa besar. RasulAllah Saw. memerintahkan Kaum Muslimin untuk mengadakan bai'ah kepada Khalifah, menyatakan bahwa kematian tanpa Bay'ah adalah yang terburuk dari semua kematian yaitu kematian Jahiliyah.

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"Barangsiapa mati tanpa bay'ah di lehernya, mati dengan kematian Jahiliyah" (Hadits Riwayat Muslim)

Maka, mengurus urusan-urusan Kaum Muslimin dikerjakan melalui Khilafah. Tanpa Islam diterapkan dalam bentuk Khilafah maka dominasi Islam dalam urusan-urusan kehidupan tidak akan terjadi.

Rakyat memilih seorang Khalifah

Khalifah mewakili Ummat dalam pemerintahan dan penerapan Syariah dan dia adalah kepala Negara Islam. Islam telah memberi hak kepada Umat untuk memilih seorang Khalifah untuk mengurus berbagai urusannya. Jadi, tidak ada paksaan jenis apapun yang dibolehkan ketika Umat memilih seorang Khalifah dan melalui Sumpah (Bay'at), kandidat yang berhasil bisa menjadi Khalifah. Kaum Muslim memberikan Bay'ah kepada keempat Khulafa-u-Rasyidin melalui kerelaan dan pilihan mereka sendiri. Bay'ah Khilafah diberikan dengan kondisi bahwa Khalifah yang terpilih akan menerapkan Islam secara komprehensif dan eksklusif.

Khilafah bukanlah Kediktatoran, bukan pula Demokrasi

Di dalam Khilafah, kedaulatan adalah milik Syari'ah Allah Swt. dan bukan manusia. Maka, dalam Khilafah baik Khalifah maupun Umat diikat oleh peraturan Islam. Khalifah tidak dibolehkan menerapkan hukum apapun yang dia inginkan, tetapi dia akan terikat untuk menerapkan hukum-hukum yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Swt. berfirman,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ

"Barangsiapa yang tidak menerapkan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." [Terjemah Makna Qur'an Surat (5) Al Ma'idah 44]

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ

"Barangsiapa tidak menerapkan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim." [Terjemah Makna Qur'an Surat (5) Al Ma'idah 45]

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ

"Barangsiapa tidak menerapkan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." [Terjemah Makna Qur'an Surat (5) Al Ma'idah 47]

Namun, dalam Demokrasi hak untuk menentukan benar dan salah ada di tangan orang-orang bukannya Sang Pencipta alam semesta. Di bawah bendera kebebasan, demokrasi membuat manusia bebas dari batasan menjalani kehidupan sesuai Islam. Para wakil terpilih dari rakyat membuat hukum-hukum menurut nafsu dan keinginan mereka sendiri. Keputusan mayoritas wakil adalah yang berkuasa, apapun keputusan itu. Maka, demokrasi tidak punya hubungan apapun dengan deen/agama. Jadi, tidaklah dibolehkan bagi Kaum Muslimin untuk menerima sistem apapun yang didasarkan pada demokrasi. Allah Swt. berfirman,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ

"Sesungguhnya agama (yang diridhoi) di sisi Allah hanyalah Islam." [Terjemah Makna Qur'an Surat (3) Ali Imran 19]

Khilafah akan mengakhiri kolonialisme dalam segala bentuknya

Realitas sistem pemerintahan Pakistan adalah sistem kolonialis yang diwariskan oleh Inggris, sehingga para kolonialis bisa mengendalikan urusan-urusan Pakistan melaluinya. Maka, sistem Pakistan menyediakan para kolonialis banyak jalan yang melaluinyalah mereka mengamankan berbagai kepentingannya. Karena hak untuk legislasi ada di tangan para wakil rakyat, dimungkinkan

bagi para kekuatan kolonialis untuk menggunakan sistem Pakistan untuk berbagai kepentingan mereka sendiri. Dalam kediktatoran, para kolonialis butuh mendapatkan seorang manusia untuk membuat berbagai aturan dan kebijakan yang sesuai dengan kehendak mereka, dan dalam demokrasi mereka menggaet kelompok wakil rakyat yang menjadi mayoritas. Islam sepenuhnya menolak kediktatoran oleh satu orang maupun oleh kelompok mayoritas. Dalam Khilafah semua hukum akan diterapkan atas dasar dalil Syari'ah dan ia mengikat Khalifah untuk menggali semua hukum dari Qur'an dan Sunnah. Dengan cara ini, Kedaulatan akan menjadi sebenar-benarnya untuk Syari'ah dan tidak akan mungkin bagi para kolonialis untuk menggunakan legislasi demi kepentingan mereka sendiri.

Peran para wakil rakyat terpilih dalam Khilafah

Syari'ah telah memberikan izin untuk memilih para wakil untuk mengurus berbagai urusan Kaum Muslim. RasulAllah Saw. bersabda di Bay'ah Aqabah Kedua,

أَخْرِجُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، لِيَكُونُوا عَلَى قَوْمِهِمْ بِمَا فِيهِمْ

"Bawalah kepadaku 12 pemimpin sehingga mereka bisa bertanggung jawab atas urusan-urusan rakyatnya"

Dalam Khilafah, para wakil di Majelis Umat dipilih, tidak ditunjuk oleh Khalifah. Seperti Khalifah, Majelis Umat tidak bisa menentukan apa yang benar dan salah, karena Kedaulatan adalah untuk Syariah. Namun Majelis Umat dengan tegas meminta pertanggungjawaban Khalifah dan menyediakan konsultasi dalam mengurus berbagai urusan rakyat. Khalifah pergi ke Majelis Umat untuk konsultasi mengenai berbagai urusan rakyat. Tetapi, konsultasi ini tidak pernah bisa membuat yang halal menjadi haram atau yang haram menjadi halal. Maka di dalam Khilafah, konsultasi tidak bisa dibuat untuk menerapkan Pajak Penjualan atau memprivatisasi aset-aset energi, karena itu semua haram dalam Islam. Demikian juga, tidak akan ada konsultasi mengenai perkara-perkara yang diwajibkan dalam Islam, seperti mengirim kekuatan bersenjata untuk membebaskan tanah-tanah Muslim terjajah atau membuat Aqidah Islam menjadi dasar pendidikan atau menyatukan semua negeri Muslim sebagai satu negara Khilafah.

Para warga negara non-Muslim bisa menjadi angota Majelis Umat dalam rangka mengadukan tentang kesalahan penerapan Islam atau opresi atas mereka. Namun demikian, non-Muslim tidak akan punya hak untuk memberikan opini mereka mengenai hukum-hukum Syari'ah. Memang, non-Muslim tidak percaya terhadap pandangan Islam serta syahadat yang melahirkan hukum-hukum Syariah yang menjadi solusi-solusi untuk berbagai masalah manusia.

Bagaimana keputusan-keputusan akan diambil mengenai perkara-perkara pemerintahan

Islam tidak hanya menjelaskan prinsip-prinsip mengenai bermacam sistem tapi juga memberikan peraturan mendetail. Sebagai contoh dalam sistem ekonomi, terdapat pengaturan mengenai pertanian, tanah, Riba (bunga), mata uang, kepemilikan umum dan pemasukan negara. Dalam kebijakan luar negeri, terdapat pengaturan mengenai jihad, perjanjian internasional dan hubungan diplomatik. Demikian pula, dalam sistem pemerintahan, ada pengaturan tentang pemilihan, Bay'ah, penunjukan para Gubernur dan aturan-aturan tentang pencopotan para pemimpin. Khalifah terikat

untuk menerapkan aturan-aturan itu sebagaimana adanya. Khalifah tidak bisa bertindak pribadi berdasarkan suka dan tidak suka dalam perkara-perkara itu dan tidak juga Khalifah butuh mayoritas para wakil rakyat untuk menerapkan hukum-hukum itu.

Mengenai berbagai pengaturan yang dibolehkan ada perbedaan pendapat, Syariah telah memberikan hak kepada Khalifah untuk mengadopsi pendapat yang dia pikir paling kuat didasarkan pada dalil-dalil Syar'i dan menerapkannya sebagai hukum negara. Abu Bakar r.a. di permulaan Khilafah-nya menolak opini mayoritas Sahabat r.a. mengenai mereka yang menolak Zakat dan dia mengirim pasukan untuk mengatasi mereka. Umar r.a. menerapkan ijtihad-nya mengenai tanah-tanah Irak, meski Bilal r.a. dan para Sahabat Besar lainnya berbeda pendapat dengannya. Khalifah tidak akan mengadopsi opini apapun mengenai ibadah individual atau cabang-cabang aqidah, dan rakyat dalam perkara-perkara itu akan dibolehkan mengadopsi menurut ijtihad.

Dalam perkara-perkara di mana publik punya pengetahuan dan yang bersifat teknis, Khalifah akan terikat untuk bertindak atas dasar opini mayoritas rakyat. Sebagai contoh: jika Khalifah menanyai rakyat di area tertentu apakah jalanan harus diperbaiki atau universitas harus didirikan di area itu, maka dalam situasi ini Khalifah akan terikat untuk bertindak atas dasar opini mayoritas rakyat (yaitu mayoritas para wakil mereka). Sebelum Perang Uhud, RasulAllah Saw. dan para Sahabat Besar r.a. memandang bahwa Kaum Muslim harus bertarung melawan Quraysh dari dalam dinding Madinah. Namun mayoritas para Sahabat Muda r.a. berpandangan bahwa mereka harus menemui Qurays dalam perang di luar Madinah. Opini mayoritaslah yang diterapkan, meski itu berkebalikan dengan opini RasulAllah Saw. dan para Sahabat Besar r.a. dan perang itu terjadi di luar Madinah, di Uhud.

Dalam perkara-perkara yang hanya para ahli yang tahu, Khalifah akan berkonsultasi dengan para ahli bukannya publik umum. Setelah berkonsultasi dengan mereka, Khalifah akan mengadopsi opini berdasarkan bukti-bukti paling kuat. Dalam hal ini pandangan mayoritas ahli bukanlah yang menjadi pertimbangan, karena opini terkuat bisa jadi merupakan pandangan mayoritas dan bisa jadi tidak. Jadi, jika terdapat kekurangan listrik, maka setelah berkonsultasi dengan para ahli, Khalifah akan punya hak untuk memberi keputusan final apakah menghasilkan listrik dari energi nuklir, energi matahari atau konversi batubara ke minyak, menggunakan teknologi batubara ke cair. Dalil Syara'-nya adalah bahwa selama Perang Badar, RasulAllah Saw. merelokasi pasukan berdasarkan konsultasi dengan hanya satu orang ahli militer, Habab al-Mundhir r.a.

Sistem Pakistan saat ini mengamankan para penguasa dari pertanggungjawaban, hanya dalam Khilafah meminta pertanggungjawaban tegas bisa dilakukan

Menurut artikel 248 konstitusi 1973, Presiden, Gubernur, para Menteri dll diabaikan dari pertanyaan apapun tentang pertanggungjawaban mereka di hadapan pengadilan. Selain itu, para anggota parlemen bebas untuk membuat aturan apapun berdasarkan opini mayoritas, sehingga mereka bisa membuat legislasi untuk mencegah akuntabilitas mereka. Contoh saat ini adalah National Reconciliation Ordinance (NRO), di mana berbagai kasus dari pembunuhan hingga mengkorupsi milyaran rupee diabaikan dari sidang di pengadilan. Dengan begitu, akuntabilitas dalam sistem saat ini hanyalah lelucon sirkus. Dalam Khilafah, Khalifah bukanlah seorang raja juga bukan seorang diktator. Tidak juga dia punya hak untuk mengubah hukum Islam menurut kemauannya sendiri. Dalam Khilafah, bukanlah sekadar hak rakyat untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan Khalifah, tetapi merupakan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin

mereka. Sungguh, menyuruh dan mengikuti yang Ma’ruf dan mencegah yang Munkar adalah kewajiban. RasulAllah Saw. bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

“Demi Yang jiwaku berada di Tangannya, kalian menyuruh yang ma’ruf dan melarang yang munkar, atau Allah akan mengirimkan hukuman, kemudian kalian berdoa pada-Nya dan kalian tidak akan dikabulkan” (Hadits Riwayat Tirmidzi)

Maka dalam Khilafah, siapapun individu, partai, Majelis Umat atau Mahkamah Tindak Kezaliman bisa meminta pertanggungjawaban Khalifah. Islam telah memerintahkan bahwa Khalifah harus disingkirkan ketika dia tidak memerintah menurut apa yang Allah Swt. wahyukan atau ketika dia menindas rakyat. Pencopotannya adalah keharusan untuk menghilangkan penindasan. Dalam situasi demikian, publik bisa menyampaikan kasus kepada Mahkamah Madzalim dan jika kejahatan terbukti, Mahkamah Madzalim akan punya hak untuk menyingkirkan Khalifah.

Khilafah akan membasmi korupsi politis

Korupsi politis hadir di setiap peradaban demokratis dan Pakistan bukanlah pengecualian. Secara serampangan korupsi disalahkan sepenuhnya pada individu-individu, ketika faktanya adalah sistemnya yang memproduksi individu-individu semacam itu dan memberi tangan terbuka bagi para individu itu untuk melakukan korupsi. Dalam sistem ini, manusia mendefinisikan apa yang benar dan salah, jadi para individu korup menyadari bahwa mereka bisa membuat korupsi di atas hukum. Jadi, membelanjakan jutaan rupee untuk menjadi seorang wakil terpilih dipandang sebagai investasi menguntungkan. Dengan cara ini, kebanyakan orang rusak dalam masyarakat dijaring masuk ke dalam dewan, yang sekarang menjadi suatu forum untuk mengamankan berbagai kepentingan mereka yang korup, bukannya mengurus sebaik-baiknya berbagai urusan rakyat. Selain itu, untuk menghindari voting tidak-percaya, para penguasa berusaha menjaga para wakil selalu setuju dengan suap dana berbagai kementerian dan pembangunan, memperparah korupsi.

Tapi dalam Khilafah, karena Islam sendiri memutuskan apa yang benar dan salah, tidak ada insentif bagi individu-individu korup untuk menjadi anggota Majelis Umat. Dan dalam Khilafah, para wakil rakyat tidak bisa mengancam pemimpin melalui ancaman voting tidak-percaya berdasar nafsu atau keinginan, karena Khalifah disingkirkan hanya ketika dia menyalahi Islam. maka, dengan jalan ini Khilafah akan mengakhiri korupsi, tidak seperti demokrasi di mana korupsi subur berkembang.

Sistem Ekonomi

Memungkinkan warga negara mendapat bagian dari kekayaan

Mengatasi kemiskinan dan kekurangan melalui distribusi

Kemiskinan dan kekurangan hanya bisa benar-benar dientaskan dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tiap warganegara dan memberi tiap warga negara kesempatan yang adil untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tambahan. Kekeliruan sistem kapitalis adalah bahwa ia berusaha secara keliru untuk mengurus kemiskinan dan kekurangan dengan meningkatkan produksi, tanpa menangani perkara sesungguhnya, yaitu distribusi kekayaan untuk setiap individu.

Jadi, pemerintah dahulu hingga kini telah menujukan perhatian mereka ke pertumbuhan dalam produksi dan peningkatan rata-rata penghasilan, sementara membuta terhadap bagaimana kekayaan ini didistribusikan di dalam masyarakat. Seiring waktu, meski ada pertumbuhan, juga terdapat konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang. Pihak yang kuat menggalang kekayaan melalui kekuatan mereka sementara pihak yang lemah menjadi semakin kekurangan bagian, karena lemahnya mereka. Ini dipastikan meningkatkan kemiskinan, bukannya mengentaskannya.

Secara unik, Islam mengatasi masalah distribusi. Allah Swt. berfirman,

كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."
[Terjemah Makna Qur'an Surat (59) Al-Hasyr 7]

Islam menyediakan hukum-hukum unik mengenai energi, pemasukan negara, investasi, pertanian dan industri, yang memungkinkan para individu untuk mengambil bagiannya, tanpa membuat yang lain kekurangan.

Masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari sumber-sumberdaya energi

Sistem kapitalis memastikan bahwa para pemilik modal swasta diuntungkan dari sumber-sumberdaya energi sementara masyarakat menghadapi kesulitan. Meningkatnya harga-harga layanan publik adalah konsekuensi privatisasi kapitalis berbagai kepemilikan masyarakat. Privatisasi meningkatkan harga-harga layanan umum sehingga para pemilik swasta bisa dapat untung besar. Sebagai contoh Bank Dunia telah mengamati secara dekat kenaikan-kenaikan dalam tagihan listrik masyarakat, yang membubung antara 2000 dan 2004 dan terus meningkat. Jadi, sementara kelompok lokal kecil menimbun kekayaan sangat besar dengan memiliki sumber-sumberdaya energi, masyarakat luas dijangkiti dengan harga-harga energi meningkat tak terjangkau. Dan kenaikan biaya-biaya juga telah membuat cacat industri dan pertanian Pakistan.

Islam memberikan sumber-sumberdaya energi sebagai milik publik. Negara atau para individu tidak bisa mereguk keuntungannya untuk diri mereka sendiri. Sebaliknya Islam memastikan bahwa keseluruhan masyarakat mendapat keuntungan dari kekayaan. RasulAllah Saw. bersabda,

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

"Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang gembalaan dan api" (Hadits Riwayat Ahmad)

Jadi Khilafah akan memastikan bahwa masyarakat mendapat keuntungan dari sumber-sumberdaya energi, menyediakan energi murah untuk membahanbakari pertanian dan industri dan biaya-biaya domestik terjangkau.

Abolisi perpajakan opresif

Di bawah sistem kapitalis, para warga negara menghadapi beban besar perpajakan. Pajak penghasilan memakan gaji-gaji rakyat, pajak penjualan menjadikan membeli obat dan makanan pokok sebagai beban sementara perpajakan atas bahan bakar dan energi mencekik produksi industri dan pertanian. Islam bebas dari pajak-pajak keji seperti pajak penjualan dan pajak penghasilan. RasulAllah Saw. bersabda,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

"Pengumpul pajak tidak akan pernah masuk surga" (Hadits Riwayat Ahmad)

Sungguh, Islam punya sistem unik sendiri pengumpulan pendapatan negara untuk rakyat, termasuk pendapatan dari kepemilikan publik, seperti gas, dan produksi pertanian, seperti kharaj, dan produksi industrial melalui Zakat atas barang-barang tertentu. Jadi, Khilafah akan mampu menghasilkan pendapatan besar sementara mendorong aktivitas ekonomi yang dinamis dan kuat.

Investasi domestik untuk menggantikan intervensi asing

Bayt-ul Mal akan punya akses ke dana-dana besar melalui sistem pendapatan Islam, insyaAllah. Dana-dana itu akan dibelanjakan untuk area-area pembangunan penting, seperti rumah sakit dan sekolah di area-area pedesaan dan industri berat.

Pendapatan-pendapatan itu akan memungkinkan pembiayaan proyek-proyek besar, seperti pembangunan dam dan pembangunan telekomunikasi pedesaan, utang bebas bunga dan hibah untuk penghidupan tanah pertanian, tanpa bergantung pada investasi atau utang asing. Investasi asing oleh negara-negara kolonialis dan hutang-hutang dari berbagai institusi finansial kolonialis selalu datang dengan persyaratan untuk meningkatkan kendali para kolonialis atas sumber-sumberdaya suatu negara, yang mengakibatkan terkuburnya potensi negara yang sebenarnya.

Menyelamatkan diri dari utang-utang dzalim

Per 30 Juni 2007, Pakistan punya hutang dengan Paris Club $12,694 milyar, berbagai institusi multilateral seperti World Bank $18,687 milyar dan IMF $1,407 milyar. Semuanya bertotal $32,788 milyar. Seperti bangsa-bangsa berutang di seantero dunia, Pakistan tidak akan pernah membebaskan diri dari jebakan utang karena bunga (riba). Pakistan telah mengeluarkan milyaran dollar untuk bayar bunga, faktanya lebih dari utang aslinya tapi tetap saja berada dalam hutang.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." [Terjemah Makna Qur'an Surat (2) Al-Baqarah 275]

Khilafah akan membeberkan kedzaliman perbudakan kolonialis atas negara-negara melalui utang-utang berbunga dan akan menggalang negara-negara miskin untuk menghapus eksploitasi ekonomi global.

Mengatasi akar masalah inflasi harga-harga

Alasan utama bagi peningkatan biaya hidup yang merusak, adalah hilangnya nilai Rupee. Rupee yang lebih lemah menjadikan membeli barang-barang menjadi lebih mahal dan telah menyebabkan berbagai kemerosotan di banyak pasar.

Namun, institusi kolonialis IMF (International Monetary Fund), bersikeras mendesak untuk depresiasi Rupee. Ini adalah karena Rupee yang lebih lemah menguntungkan para multinasional Barat sehingga sekarang bisa memproduksi barang-barang dengan murah di Pakistan dan kemudian mengekspornya ke perekonomian Barat dengan nilai tukar menguntungkan.

Selain itu, mata uang di negara Islam didasarkan pada emas dan perak sehingga memungkinkan mata uang Khilafah mencegah kenaikan harga-harga, yang dihasilkan mata uang fiat (tanpa cadangan emas) hari ini.

Mengadakan revolusi industri

Negara harus mendirikan 2 jenis pabrik berdasarkan kewajiban Negara untuk mengurus berbagai kepentingan warganegara.

Pertama, pabrik-pabrik yang berkaitan dengan aset-aset milik publik seperti pabrik pengeboran minyak dan penyulingan. Karena aset-aset milik rakyat adalah milik semua kaum Muslimin, maka begitu pula pabrik-pabrik yang terlibat dalam pengeboran dan penyulingan. Negara mendirikan mereka mewakili kaum Muslim.

Kedua, pabrik-pabrik yang terkait dengan industri berat dan penghasil senjata. Para individu boleh memiliki pabrik semacam itu, tapi karena industri-industri demikian memerlukan dana besar Negara Khilafah akan menyediakannya. Militer yang kuat hanya mungkin ada jika ada industri besar, yang mampu memproduksi mesin dan peralatan.

Khilafah akan memastikan bahwa kaum Muslimin mendirikan industri efektif, sementara menciptakan lapangan kerja yang akan menguntungkan keseluruhan Umat.

Teknologi militer

Hari ini, militer Pakistan bergantung pada teknologi imporan. Amerika menjual senjata dengan maksud membangun pengaruh dan kepemimpinan atas Pakistan. Ada banyak batasan atas transfer teknologi, membuat militer Pakistan menjadi sandera bagi suplai suku cadang dan amunisi Amerika. Pakistan dijuali teknologi kuno yang tidak berguna bagi Amerika, seperti F-16 yang sudah ketinggalan laju teknologi.

Supaya Negara Khilafah menjadi independen dari negara-negara lain dan tidak dipengaruhi oleh siapapun dari mereka, ia harus memproduksi dan mengembangkan persenjataannya sendiri. Ini membuatnya independen dan terus memiliki persenjataan paling maju dan terkuat. Ia juga akan menguasai, semua senjata yang dibutuhkan untuk mengintimidasi, baik musuh terlihat maupun musuh potensial. Allah Swt. berfirman,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya." [Terjemah Makna Qur'an Surat (8) Al-Anfal 60]

Hukum-hukum pertanian untuk ekspansi

Meskipun Pakistan memiliki sumber-sumberdaya pertanian mantap, terdapat pengabaian dan non-pengolahan lahan. Terdapat mereka yang mempunyai lahan-lahan luas tapi tidak mampu mengolahnya. Juga terdapat eksploitasi karena kepemilikan lahan dipisahkan dari pengolahannya. Jadi, banyak jumlah mereka yang mengolah lahan yang sebenarnya tidak dimilikinya, tapi membayar sewa pada pemilik sebenarnya. Islam memandang masalah pertanian terkait dengan pengolahan lahan dan bukan jumlah lahan yang dimiliki. Secara unik, Islam memecahkan masalah pertanian dengan melarang pemisahan kepemilikan lahan dari pengolahannya. RasulAllah Saw. bersabda,

مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ

"Barangsiapa mengolah lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun, dia lebih berhak atasnya." (Hadits Riwayat Bukhari)

Islam juga telah menyuruh untuk mengambil kembali lahan pertanian dari pemiliknya jika tidak diolah selama 3 tahun berturut-turut. Ini akan memastikan pemanfaatan penuh lahan pertanian oleh pemiliknya yang akan meningkatkan produksi pertanian. Negara Khilafah akan menyediakan hibah ataupun hutang tanpa bunga bagi siapapun yang bisa mengolah lahan, berkontribusi pada ekspansi kemampuan pertanian Negara. Jadi, dalam jangka waktu pendek, akan ada peningkatan dalam pengolahan lahan dan peningkatan penghidupan pedesaan.

Peradilan

Sistem keadilan yang diberikan oleh Allah adalah rahmat bagi umat manusia

Hanya Islam yang bisa memberikan keadilan bagi umat manusia

Tidak ada masyarakat yang bisa membayangkan kehidupan damai dan tentram tanpa keadilan. Keadilan disediakan menurut suatu standar. Jadi, menurut sudut pandang seseorang terhadap kehidupan, keadilan didefinisikan. Sebagai contoh: Haruskan seseorang yang menghina RasulAllah Saw. dibunuh menurut Islam atau haruskah dia dilindungi karena ‘kebebasan berbicara’?

Dalam demokrasi, kriteria keadilan adalah kehendak manusia, di mana para wakil dalam suatu dewan berdaulat mendefinisikan kejahatan dan hukumannya. Sebaliknya, dalam sistem Khilafah Islam, Allah Swt. adalah yang berdaulat sebenar-benarnya, jadi pengaturan Syariah mendefinisikan kejahatan dan seperangkat kriteria untuk pengaturan peradilan. Adalah di atas dasar unik ini para hakim menyediakan keadilan untuk publik. Jadi, tidak ada pemisahan pengadilan sipil dan pengadilan Syari’ah dalam Khilafah karena semua pengadilan membuat keputusan berdasarkan hukum-hukum Islam.

Tidak seperti sistem sekarang, peradilan Khilafah akan memberikan keadilan segera

Warga negara biasa di Pakistan menghadapi frustrasi besar ketika mengejar keadilan, disebabkan oleh hukum-hukum administratif pengadilan. Bahkan jika pembahasan kasus dimulai setelah beberapa sidang awal, seseorang harus bersusah melalui sidang berulang-ulang selama berbulan-bulan dan kadang bertahun-tahun sebelum mendapat keputusan. Dan jika suatu keputusan yang benar diberikan, si pembela punya hak untuk menyangkalnya di pengadilan-pengadilan lebih tinggi, lagi-lagi menunda keputusan akhir. Karena sistem ini diwarisi dari orang Inggris, ribuan kasus bertumpuk mengantri di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, dengan kasus-kasus baru ditambahkan setiap bulan. Situasi semacam ini hanya mendorong berbagai elemen kriminal yang tahu bahwa ketika mereka akhirnya diputuskan bersalah oleh pengadilan, mereka bisa mengajukan banding (menyangkal keputusan), menunda perkara itu selama beberapa tahun.

Khilafah akan mengakhiri situasi menyedihkan ini karena keputusan pengadilan adalah final. Tidak ada pengadilan lain atau bahkan Khalifah yang bisa membalik keputusannya, kecuali keputusan itu bertentangan dengan pengaturan baku dalam Islam di mana tidak boleh ada perbedaan pendapat, atau hakim telah menolak realitas nyata, tanpa alasan apapun. Dalam kasus demikian, kejadian itu akan dilaporkan ke Mahkamah Tindak Kezaliman (Mahkamat ul-Mazlama). Dengan cara ini, publik diberi keadilan segera, tanpa beban besar di pengadilan. Dan berbagai elemen kriminal akan hidup dalam ketakutan bahwa keputusan bersalah akan segera terjadi.

Dalam Khilafah, seorang tersangka tidak akan dipenjara berdasarkan kecurigaan

Dalam peradilan warisan-Inggris, penindasan dimulai segera setelah suatu kasus didaftarkan. Orang-orang secara fitnah melaporkan kasus palsu melawan para musuhnya sehingga mereka bisa dilempar ke penjara, atas nama penahanan pengadilan. Hari ini, di Pakistan, ribuan orang tak bersalah ditindas, ditangkap berdasarkan kecurigaan dan tidak bisa membayar uang tebusan.

Dalam peradilan Islam, seorang tersangka dianggap tak bersalah hingga terbukti bersalah, jadi tidak ada ruang untuk memenjarakan seseorang. Adalah tugas pengaju kasus atau departemen keamanan untuk membuktikan bahwa si tersangka memang bersalah, atau kasus akan segera dibatalkan, kecuali jika hakim, setelah pemeriksaan beberapa bukti kejahatan, mempunyai kecurigaan bahwa si tersangka akan kabur. Dan bahkan dalam kasus terbatas seperti itu, si tersangka akan dibebaskan tanpa harus menyediakan tebusan, atas adanya para saksi bagi ketidak-bersalahannya. Jadi, Khilafah akan membebaskan kaum Muslimin dari penindasan di tangan sistem saat ini.

Dalam Khilafah, siapapun dalam jajaran pemimpin bisa diadili

Dalam sistem demokratis Pakistan, para penguasa bisa membuat amandemen terhadap hukum-hukum untuk mengamankan diri mereka sendiri dan berbagai kebijakannya dari pengadilan. Menurut artikel 248 konstitusi Pakistan, Presiden, Gubernur, Menteri dll dikecualikan dari penghukuman atas berbagai tanggung jawab mereka. Demikian pula, publik tidak bisa membawa para penguasa ke pengadilan untuk menghukum mereka atas penerapan hukum-hukum yang tidak adil. Bahkan kebijakan-kebijakan keliru seperti memberi basis-basis militer untuk Amerika, membunuh kaum Muslim untuk mengamankan penjajahan oleh Amerika di Afghanistan atau mengirim 5000 Muslim ke Teluk Guantanamo tidak bisa diperkarakan oleh pengadilan apapun. Ini karena sesuai dengan proses demokratis, parlemen Pakistan membuat Amandemen ke-17 oleh sepertiga mayoritas, yang memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan Musharraf di 3 tahun pertamanya tidak bisa diperkarakan di pengadilan.

Dalam sistem Khilafah, tidak ada orang yang kebal hukum atau pertanggungjawaban, bahkan jika seseorang adalah pemimpin atau hakim. Qadhi Muzalim dari Mahkamah Tindak Kezaliman bisa menangani kasus-kasus oleh semua pemimpin atas kebijakan yang mereka terapkan. Dan Qadhi Muzalim punya hak untuk menghukum atau mencopot pemimpin yang manapun.

Tidaklah cukup bahwa peradilan hanya bersih dari penindasan dan tekanan

Meskipun peradilan independen itu sangat pokok, terdapat banyak perkara lain yang dibutuhkan untuk keadilan. Di antara perkara-perkara itu yaitu hukum-hukum yang mendefinisikan kejahatan. Jika hukum-hukum tidak dibuat atas dasar Islam, keadilan tidak terjadi sejak awal. Menurut hukum Pakistan, menyerukan Jihad melawan penjajahan di Irak dan Afghanistan dianggap sebagai suatu kejahatan yang oleh karenanya setiap hakim, se-independen apapun, terikat untuk menghukum para pelakunya walaupun mereka menyerukan suatu fardh (kewajiban). Demikian pula, dalam hal pajak-pajak tiranis seperti Pajak Penjualan dan Pajak Penghasilan, peradilan terikat untuk menghukum dengan hukum-hukum itu, karena sesuai dengan konstitusi, dewan punya hak untuk membuat pajak-pajak kapitalis itu sebagai bagian dari hukum. Selain itu, menurut sistem sekarang, Presiden bisa memaafkan pembunuhan menggunakan kekuasaannya, yang tidak bisa dicegah seorang hakim pun.

Jadi, tidak bisa ada keadilan bagi masyarakat kecuali hukum-hukum terkait kejahatan mengenai aturan-aturan pembuktian, jenis hukuman, hak untuk memaafkan dsb., semuanya sesuai dengan Islam. Hanya Khilafah yang akan memastikan semua hukum terkait peradilan disimpulkan dari al-Qur’an dan as-Sunnah dan oleh karenanya memastikan tersedianya keadilan.

Sistem Sosial

Pria dan Wanita bekerjasama untuk keridhoan Allah Swt.

Sistem sosial didasarkan pada Syariat Islam, bukannya nilai-nilai rusak Barat

Sistem sosial mengatur urusan-urusan laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Sistem sosial negara Khilafah akan didasarkan pada perintah Allah Swt. bukannya nilai-nilai rusak Barat. Hari ini masyarakat Barat sedang dihancurkan melalui pengadopsian prinsip "kebebasan pribadi," yang sepenuhnya menyimpang dari hukum-hukum Allah Swt. Menurut kebebasan personal seorang pribadi bebas untuk berpakaian merangsang di publik atau memenuhi hasrat seksual secara Haram. Adalah pemikiran ini yang telah menyebabkan para pria dan wanita di Barat mengadakan hubungan antara satu sama lain di luar ikatan pernikahan. Banyak dari generasi baru yang tidak jelas siapa bapaknya. Selain itu, para ibu yang menjadi orangtua tunggal bertanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, mengakibatkan anak yang kehilangan perhatian kedua orangtua.

Dalam Islam, manusia tidaklah "bebas." Setiap diri adalah seorang Abdi (hamba) Allah Swt. Manusia terikat oleh perintah-perintah Allah Swt. dalam kehidupan kolektif dan pribadi mereka. Selain itu, adalah tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa para warga negaranya menuruti hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, dalam negara Khilafah, tidak akan ada orang yang bebas minum alkohol atas nama "kebebasan pribadi", tidak juga mereka akan dibolehkan melakukan perzinaan. Hukum-hukum Islam akan menjadi dasar di mana hubungan-hubungan dalam masyarakat didirikan dan Syariat Islam itu akan menjadi satu-satunya kriteria untuk menghukumi perbuatan-perbuatan individu.

Hak dan kewajiban dari Allah Swt. atas laki-laki dan perempuan adalah sesuai dengan kemampuan alami mereka, bukannya konsep Barat tentang "Kesetaraan"

Allah Swt. adalah Pencipta pria dan wanita. Bagi-Nya jenis yang satu tidaklah lebih dihargai dari jenis yang lain. Bagi Allah Swt. satu-satunya kriteria penghargaan adalah Taqwa. Allah Swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. [Terjemah Makna Qur'an Surat (49) Al-Hujurat 13]

Laki-laki maupun perempuan bisa meraih status tertinggi melalui menyembah Allah Swt. Laki-laki maupun perempuan akan berpartisipasi dalam masyarakat dalam kapasitasnya sebagai manusia. Jadi, Allah Swt. telah memberi laki-laki dan perempuan tanggung jawab yang sama dalam hal bahwa

mereka punya kesamaan seperti kebutuhan biologis, insting dan akal. Selain itu, Allah Swt. telah memberi laki-laki dan perempuan tanggung jawab di mana mereka punya perbedaan, menurut perbedaan jender mereka.

Di mana ada kesamaan, Sang Pencipta Swt. telah memberi tanggung jawab yang sama pada mereka; sebagai contoh sholat, puasa, haji, zakat, mematuhi orangtua, dakwah Islam, meminta pertanggung jawaban pemerintah dsb. Dan di mana ada perbedaan, Allah Swt. telah menetapkan tanggung jawab yang berbeda pada mereka. Jadi, jihad adalah kewajiban laki-laki tapi tidak atas perempuan, laki-laki harus menyediakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan perempuan tidak demikian, kewajiban memasak makanan dan mengurus rumah secara pokok ada pada perempuan, meski laki-laki (suami) juga boleh membantunya.

Bukannya mengakui keterbatasan akal manusia dan merujuk pada wahyu Tuhan, Barat malah mengadopsi pendekatan simplistik untuk masalah yang rumit dengan bersikukuh bahwa pria dan wanita adalah setara dan menimpakan “kesetaraan” atas mereka. Sebagai hasilnya, wanita menjadi rekan dalam pencarian penghasilan dan bekerja. Tapi perbedaan biologis wanita berimplikasi bahwa tanggung jawab melahirkan dan menyusui akan tetap ada padanya. Dengan cara ini, atas nama “kesetaraan”, pria telah membebani wanita dengan tanggungjawab pria. Negara Khilafah akan menerapkan hukum-hukum Islam berkaitan dengan hubungan antara pria dan wanita dan akan membebaskan wanita di dunia ini dari penindasan sistem kapitalis Barat.

Peran perempuan dalam masyarakat

Tanggung jawab utama perempuan dalam masyarakat adalah terhadap rumah tangganya dan peran utamanya adalah sebagai ibu dan istri. Mengurus berbagai urusan rumah tangga dan merawat anak-anak adalah tanggung jawab yang besar. Tapi jika seorang perempuan ingin mengadopsi pekerjaan yang dibolehkan menurut Islam, tanpa mempengaruhi tanggung jawab utamanya, maka ia sepenuhnya dibolehkan melakukannya. Jadi, seorang perempuan bisa jadi dokter, guru, insinyur, ilmuwan, hakim, pegawai negara, politisi, anggota Majlis Ummah dsb. Selain itu, dia bisa memilki berbagai kepemilikan. Namun, dia tidak boleh dipekerjakan di posisi di mana sisi feminisnya dieksploitasi, sebagai contoh modeling, pramugari, sekretaris dll. Demikian juga dia tidak boleh memegang posisi pemerintahan karena RasulAllah Saw. mengecualikan para perempuan dari tanggung jawab pemerintahan. Ketika anak perempuan raja Kisra menjadi penguasa, RasulAllah Saw. bersabda,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

“Kaum yang menunjuk wanita atas pengaturan urusan mereka tidak akan beruntung” (Hadits Riwayat Bukhari)

Tanggung jawab menyediakan kebutuhan hidup ada pada suami

Tanggung jawab menyediakan Nafqah ada pada suami. Jika karena suatu alasan dia tidak mampu melakukannya, maka tanggung jawab itu beralih ke keluarga terdekat. Jika tidak ada pencari nafkah untuk suatu keluarga, maka Negara bertanggung jawab atas Nafqah mereka.

Khilafah akan mengatur hubungan antara pria dan wanita

Campur baur antara pria dan wanita dan berkumpul berbaur pria wanita secara umum tidak akan dibolehkan. Namun, pria dan wanita bisa bertemu di mana Islam telah menentukan kebutuhan untuk bertemu kedua jender, seperti dalam perdagangan, jual-beli, sewa-menyewa, perwakilan (wakilah) dan perkara-perkara yang dibolehkan (Mubah) lainnya, atau untuk perbuatan wajib seperti melaksanakan Haji dan membayar Zakah, atau untuk perbuatan sunnah (Mandub) seperti Sadaqah, membantu orang miskin dan mengunjungi orang sakit, pria dan wanita bisa bertemu bersama. Selain itu, seorang wanita bisa pergi keluar rumahnya untuk semua perkara itu, dengan menaati aturan berpakaian yang telah dituntunkan oleh Syariah.

Laki-laki dan perempuan yang asing satu sama lain tidak boleh berduaan menyendiri yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram satu sama lain, tidak boleh berduaan menyendiri di suatu tempat, di mana orang ketiga tidak ada, atau di mana seseorang tidak bisa memasuki tempat atau ruang tanpa izin mereka.

RasulAllah Saw. bersabda,

لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"Seorang perempuan dan laki-laki tidak boleh menyendiri berduaan kecuali si perempuan dengan mahramnya bersamanya" (Hadits Riwayat Bukhari)

Selain itu, sebelum seorang perempuan meninggalkan rumahnya, diwajibkan atasnya untuk memakai Khimar (kerudung) dan Jilbab (baju kurung Islami) yang akan menutupinya dari pundaknya hingga pergelangan kaki. Allah Swt berfirman,

َا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

"Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka" [Terjemah Makna Qur'an Surat (33) Al-Ahzab 59]

Laki-laki juga punya kewajiban menutup aurat, dari pusar hingga lutut.

Syariah Islam akan menciptakan masyarakat saleh dan tenteram

Hari ini, masyarakat Pakistan ada dalam bahaya menjadi refleksi masyarakat kapitalis Barat, di mana tingkat kejahatan seksual meningkat hari demi hari. Pesta-pesta bercampur baur, ketidaksenonohan dan kevulgaran sedang didorong untuk menghancurkan generasi muda kita. Banyaknya dan mudahnya akses pada film-film amoral, drama-drama panggung vulgar dan pesta-pesta joget memicu kaum muda belum menikah untuk menerjang batas Allah Swt. dalam memenuhi naluri alami mereka. Namun, sebagaimana bisa dilihat di masyarakat Barat, ini tidak akan pernah mengantarkan kepada kebahagiaan, kepuasan atau ketenteraman. Dalam Khilafah, penerapan sistem sosial

memastikan masyarakat saleh dan beradab, di mana pria dan wanita melakukan berbagai aktivitas harian mereka dengan cara terhormat. Ini adalah masyarakat di mana wanita tidak dilihat sebagai komoditas materi untuk dieksploitasi, tapi sebagai warganegara terhormat dan aktif. Suatu masyarakat di mana kaum mudanya akan dilindungi dari berbagai konsep rusak dan pembentukan pribadi mereka akan dilakukan dengan cara yang membuat hati mereka terisi dengan Taqwa. Dan di mana mereka akan diberi lingkungan di mana mereka bisa memenuhi perasaan-perasaan alami mereka, sementara tetap berada dalam batasan Syari'ah. Dan setelah semua ini, siapapun yang tetap melanggar batasan Allah Swt. akan dihukum tegas di depan publik sehingga ia menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat.

EXPOSE
MUSHARAF
and call for real change!
DEMONSTRATION
No to Musharraf! - the dictator who sold Pakistan, Dr Aafia Siddiqui and Afghanistan to America
No to Zardari! - the corrupt, weak American puppet
Yes to Khilafah for Pakistan! - for accountability, strength and an end to American interference
Saturday 2nd October 2010 - 11:30am
The New Bingley Hall, 1 Hockley Circus, Birmingham, B18 5BE
Organised by Hizb ut-Tahrir - www.hizb.org.uk - info@hizb.org.uk

Media dan informasi

Umat yang sadar

Dalam Khilafah, media akan memainkan peran utama dalam mengkonsolidasi seruan Islam

Informasi cerdas adalah pokok bagi negara, penyatuan Tanah-Tanah Muslim dan mengemban Islam ke seluruh umat manusia. Media adalah kemestian dalam menampilkan Islam secara kuat, menghubungkan berbagai pemikiran Islam ke perasaan masyarakat, sehingga menstimulasi mereka untuk menuju Islam, dalam pengkajian dan perenungan. Ia juga akan mengekspos kesalahan dan kerusakan berbagai pemikiran kufur sehingga Ummat tetap teguh dalam menghadapi serangan budaya kolonialis. Maka Khilafah akan memastikan pembasmian nilai-nilai rendah kapitalisme dan penguatan nilai-nilai mulia Islam.

Media akan memainkan perannya dalam meminta pertanggungjawaban dan menasihati pemimpin atas berbagai kebijakan. Namun, ada informasi yang bersangkut erat dengan perkara-perkara Negara, dan informasi demikian tidak bisa dipublikasikan tanpa instruksi Khalifah. Contoh-contohnya adalah perkara-perkara militer dan yang terkait, seperti pergerakan angkatan bersenjata, berita kemenangan dan kekalahan, dan industri-industri militer. Tipe-tipe berita ini harus dihubungkan langsung ke Khalifah, untuk menentukan apa yang harus dirahasiakan dan apa yang bisa dibeberkan ke publik. Allah Swt. berfirman,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).” [Terjemah Makna Qur’an Surat (4) An-Nisa’ 83]

Di luar perkara-perkara keamanan semacam itu, media bisa mempropagandakan semua bentuk informasi selama itu berdasarkan kebenaran.

Media Khilafah akan menampilkan kebesaran Islam dan kekuatan Negara Islam kepada seluruh dunia

Ke luar, selama perang atau damai, media akan mempropagandakan kebenaran Islam, keadilan yang dibawanya dan superioritas militer negara. Selain itu, media Khilafah akan membeberkan kesalahan dan kerusakan berbagai sistem buatan manusia, dan juga berbagai kelemahan pasukan militer musuh. Dengan demikian, media akan memainkan kontribusi utama menuju pencapaian tujuan-tujuan kebijakan luar negeri.

Siapapun warga negara bisa membuat channel TV atau publikasi

Setiap warga Negara Islam diperbolehkan mengadakan media cetak maupun elektronik. Tiap warga hanya perlu memberitahu departemen informasi Khilafah tentang media yang dia dirikan. Bagaimanapun juga, pemilik media akan diminta pertanggungjawabannya atas pelanggaran apapun terhadap syariah sebagaimana warga lainnya.



Kebijakan luar negeri

Membawa umat manusia keluar dari kegelapan Kekufuran menuju cahaya Islam

Hubungan dengan negara-negara lain berdasarkan hukum-hukum Islam

Terbukti bahwa selama beberapa dekade kebijakan luar negeri Pakistan berkutat di sekitar memenuhi berbagai kepentingan Amerika di kawasan itu. Silih berganti pemerintah terus mengorbankan kepentingan Islam dan Kaum Muslim demi kepentingan Amerika. Selain itu, sumber-sumberdaya dan kekuatan bersenjata yang digunakan adalah dari Kaum Muslimin. Khilafah akan mengakhiri kebijakan luar negeri perbudakan ini. Kebijakan luar negeri Khilafah akan didasarkan pada Islam. Di atas dasar ini, Khilafah akan mengadakan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain, baik hubungan ekonomi, politik, budaya maupun pendidikan. Dalam semua urusan luar negeri, negara akan memastikan bahwa Da'wah Islam diemban kepada semua umat manusia dengan cara terbaik. Hubungan-hubungan negara Islam dengan negara-negara lain akan diadakan dengan tatacara berikut.

a. Hubungan dengan pemerintah-pemerintah di Tanah-Tanah Muslim

Negeri-negeri Islam adalah Tanah-Tanah Islam yang dipecah belah oleh para agen kolonialis Kafir, sebagai bagian dari rencana mereka untuk menghapus Khilafah. Menurut Syari'ah menyatukan mereka menjadi satu negara adalah kewajiban. Itulah mengapa Khilafah tidak akan menganggap hubungan-hubungan dengan negeri-negeri itu dalam kerangka kebijakan luar negeri dan setiap usaha akan dibuat untuk menyatukan semua negeri itu menjadi satu negara di bawah bendera Khilafah.

b. Hubungan dengan negara-negara non-Muslim

- Negara-negara yang telah menjajah tanah-tanah Muslim atau yang terlibat dalam perang aktif melawan Kaum Muslim seperti Amerika, Inggris, Israel dan India. Hubungan dengan negara-negara itu akan diadakan berdasarkan Harb Fi'lan (Perang Aktif). Tidak ada hubungan diplomasi, ekonomi atau budaya yang akan diadakan dengan negara-negara musuh seperti itu dan tidak juga para warga negaranya akan dibolehkan memasuki Khilafah. Hubungan dengan negara-negara itu akan diadakan atas kebijakan perang aktif, meski jika ada gencatan senjata temporer dengan mereka. Jadi, hubungan diplomasi, ekonomi dan budaya dengan negara-negara itu akan terus ditangguhkan.
- Dengan negara-negara yang belum menjajah tanah-tanah Muslim tapi punya niat untuk menjajah tanah-tanah Muslim. Dengan negara-negara semacam itu tidak akan ada hubungan diplomasi, perdagangan dan budaya. Namun, para warga negara-negara itu dibolehkan memasuki Khilafah dengan visa sekali masuk.
- Selain negara-negara yang disebutkan di atas, Khilafah dibolehkan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara non-Muslim yang bukan musuh. Sementara terus-menerus memonitor skenario politik internasional, Khilafah akan menerima dan menolak berbagai

perjanjian untuk semakin jauh menyerukan Islam. Perjanjian-perjanjian itu mungkin ekonomi, diplomatik atau budaya, tapi semua perjanjian itu harus menuruti Islam. Negara Khilafah dengan cadangan minyak, gas dan mineral sangat besar, angkatan bersenjata kuat, posisi strategis di dunia, visi politik, pemahaman mendalam terhadap situasi politik internasional dan satu Ummat dengan vitalitas, akan menghindari isolasi politik di kancah dunia dan akan bermaksud memperoleh status negara pemimpin.

Khilafah akan mengemban Islam ke seluruh dunia melalui Dakwah dan Jihad

Arti Jihad adalah meninggikan Deen Allah Swt. menjadi yang tertinggi, dengan secara aktif berpartisipasi dalam perang atau membantu jihad secara langsung dengan harta atau perkataan. Jihad adalah metode praktis menyebarkan Dakwah Islam ke seluruh dunia. Hari ini, dalam ketiadaan Negara Islam dan Jihad, Islam telah dikerdilkan menjadi teori yang indah bagi non-Muslim, yang tidak diterapkan secara keseluruhan di manapun di dunia. Bagi orang-orang non-Muslim, Dakwah Islam memberi mereka kesempatan untuk hidup dalam masyarakat Islami, sehingga mereka bisa tahu bahwa Islam adalah satu-satunya Deen yang benar. Jadi, Islam memberi kewajiban atas Kaum Muslimin untuk menerapkannya di satu area kemudian membawanya ke seluruh dunia dengan Jihad. Ini adalah metode Dakwah yang diadopsi Nabi Muhammad Saw. dan setelah beliau para Kulafa Rasyidin menyebarkan Islam dengan Jihad juga.

Merupakan kewajiban Ummat Muslim untuk membebaskan umat manusia dari penindasan

Allah Swt. mengutus Muhammad Saw. sebagai Rahmat lil-Alamiin, Rahmat untuk Alam Semesta, dan sistem yang beliau bawa adalah rahmat bagi semua umat manusia. Jadi, tidak terbatas bagi kaum Muslim. Merupakan kewajiban Ummat Muslim untuk membebaskan semua umat manusia dari penindasan, karena berbagai sistem, hukum, tradisi buatan manusia. Jika kasta rendah, shudra, dianggap lebih hina daripada seekor binatang dalam masyarakat Hindu, maka ini tidak boleh ditoleransi demi “hidup bersama”. Contoh lainnya mengenai penindasan, sekelompok perusahaan mendominasi Amerika, menggunakan kekayaan dan darah para warga negara untuk menjalankan berbagai perang. Penindasan semacam itu telah disahkan dengan menjadikannya sebagai bagian dari sistem dan oleh karenanya keseluruhan masyarakat menjadi tertindas. Sungguh, ketika manusia mengatur berdasarkan sistem selain yang diwahyukan Allah Swt., penindasan akan selalu dihasilkan. Allah Swt. berfirman,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barangsiapa yang tidak menerapkan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” [Terjemah Makna Qur’an Surat (5) Al-Ma’idah 44]

Khilafah tidak hanya akan membebaskan kaum Muslimin dari penindasan ini, tapi juga semua manusia. Berbagai hambatan yang menghalangi pihak tertindas dari rahmat Islam akan disingkirkan dengan kekuatan, melalui Jihad.

Pencegahan Minimum bertentangan dengan Islam, sebaliknya Khilafah akan mengupayakan superioritas militer

Kebijakan militer Pakistan didasarkan atas ide pertahanan dan oleh karenanya ada sebutan pencegahan minimum, yaitu mengurangi kapabilitas militer kalian hingga ke tingkat di mana hanya pertahanan yang mungkin dilakukan. Pencegahan minimum adalah produk sudut pandang kapitalis tentang negara bangsa. Bangsa-bangsa harus menjaga diri mereka sendiri di dalam garis batas mereka dan tidak mencaplok tanah-tanah lain, di bawah bendera “hidup bersama dengan damai”. Barat mengklaim bahwa konsep-konsep ini adalah untuk memastikan kerjasama dan keadilan di antara negara-negara di dunia, tapi faktanya Barat menggunakan ide-ide itu untuk melestarikan status mereka sebagai kekuatan utama, mendominasi urusan-urusan internasional. Prakteknya mereka memelihara pengaruh mereka melalui superioritas militer, jadi pencegahan minimum adalah untuk negara-negara selain mereka sendiri. Negara-negara kuat ini menyebut departemen militer mereka “Departemen Pertahanan” atau “Kementerian Pertahanan” tapi kenyataannya mereka adalah “Departemen Perang” atau “Kementerian Perang”, yang di dalamnya mereka meningkatkan kapabilitas militer mereka untuk melakukan penindasan atas yang lain-lainnya.

Khilafah tidak akan pernah mengadopsi kebijakan pencegahan minimum. Allah Swt. berfirman,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya.” [Terjemah Makna Qur’an Surat (8) Al-Anfal 60]

Ayat ini berkontradiksi dengan pencegahan minimum dan menyeru Kaum Muslimin untuk menguasai superioritas militer, yang dengannya memungkinkan Kaum Muslim tidak hanya menantang kekuatan-kekuatan utama dunia tapi juga muncul sebagai negara pemimpin.

Khilafah tidak akan menandatangani CTBT, NPT atau perjanjian lain semacamnya

CTBT, NPT dan perjanjian-perjanjian semacam itu dipersiapkan oleh kekuatan-kekuatan Barat untuk membatasi kekuatan negara-negara lain. Berbagai kekuatan besar berkemampuan nuklir ingin menyangkal pihak-pihak lain dari menantang mereka. Khilafah akan mengadopsi kebijakan meningkatkan kekuatan sebanyak yang ia bisa, untuk memenuhi kewajiban Jihad dengan cara terbaik. Jadi, Khilafah tidak akan menerima perjanjian-perjanjian semacam itu, baik dengan syarat maupun tanpa syarat.

Khilafah akan membatalkan berbagai perjanjian militer yang mengamankan berbagai kepentingan asing

Pakistan telah membuat perjanjian-perjanjian militer dan politik dengan Amerika dan negara-negara kolonial lainnya, sebagai hasilnya adalah intelijen, militer dan polisi Umat terus digunakan dalam perangnya Amerika melawan kaum Muslim. Islam melarang pakta-pakta yang membantu Amerika dalam invasi brutalnya dalam berbagai cara, bantuan militer maupun logistik. Selain itu, Islam

melarang pakta apapun yang memberi wewenang kepada non-Muslim atas kaum Muslim dan memungkinkan mereka untuk campur tangan dalam urusan-urusan Khilafah, sehingga mendominasi berbagai urusannya dan memastikan ketergantungan keamanan terhadap kaum kuffar. Allah Swt. berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." [Terjemah Makna Qur'an Surat (4) An-Nisa 141]

Para diplomat negara lain tidak akan dibolehkan bertemu personel selain dari departemen luar negeri

Di bawah sistem sekarang, terdapat campur tangan luas dan pengaruh mendalam oleh para kolonialis, khususnya dari Amerika dan Inggris. Para duta besar dan pejabat Barat bertemu Kepala Komisi Pemilu, Kepala Angkatan Bersenjata, para pemimpin partai-partai oposisi dan bahkan dengan para ketua partai-partai Islam, berusaha memenangkan para agen mereka demi berbagai kepentingan mereka.

Dalam Khilafah, adalah tanggung jawab negara untuk mengurus berbagai urusan luar negeri. Peran Umat dalam kebijakan luar negeri adalah meminta tanggung jawab pemimpin untuk memastikan ia memenuhi peranannya. Jadi, para diplomat dan pejabat asing tidak akan dibolehkan menemui berbagai politisi dan kepala partai politik. Hanya departemen urusan luar negeri Khilafah yang akan berhubungan dengan para diplomat dan pejabat asing. Dengan cara ini, negara-negara asing akan tercegah dari memperoleh antek-antek di dalam lingkar politik dan dari menciptakan kekacauan di dalam negara.

Khilafah tidak akan mencari bantuan dari Amerika, Inggris atau negara-negara kolonialis lain untuk memecahkan permasalahan kaum Muslimin

Hari ini, para penguasa antek di Dunia Muslim, termasuk Pakistan, mengemis pada negara-negara kolonialis untuk memecahkan permasalahan mereka, termasuk penjajahan Kashmir dan Palestina, meskipun negara-negara itu aktif dalam permusuhan melawan kaum Muslim dan bernafsu mendominasi kaum Muslim. Selain itu, kebanyakan dari permasalahan itu diciptakan oleh negara-negara kolonialis sendiri. Para penguasa kacung tidak membuat permintaan tolong ini untuk melegakan kaum Muslim dari penderitaan mereka, faktanya mereka berkolaborasi dengan negara-negara kolonialis dalam memastikan berpuluh tahun penjajahan Tanah-Tanah Muslim. Para penguasa kacung itu, meminta bantuan seperti itu dalam ketundukan kepada para tuan kolonialis mereka dalam rangka menunjukkan pada Ummah bahwa ia tidak bisa memecahkan permasalahannya sendiri dan harus bergantung pada para kolonialis. Dengan melakukannya, mereka memastikan pengaruh berbagai kekuatan kolonialis itu dan mendesakkan kepentingan-kepentingan mereka melalui interferensi dalam permasalahan kaum Muslimin.

Khilafah tidak akan meminta bantuan dari negara-negara kolonialis musuh untuk memecahkan permasalahan kaum Muslim. Allah Swt berfirman:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya." [Terjemah Makna Qur'an Surat (4) An-Nisa 60]

RasulAllah Saw. Bersabda,

لاتستضىءو بنار المشركين

"Jangan membuat cahaya dari apinya kaum Musyrik" [Hadits Riwayat Nasa'i]

Khilafah tidak akan berpartisipasi dalam alat-alat para kolonialis semacam PBB, Bank Dunia dan IMF

Nyata terbukti bahwa PBB dan berbagai institusi semacam World Bank dan IMF adalah alat-alatnya para kolonialis. Barat beraksi memisahkan Timor Timur, di bawah supervisi PBB, tapi resolusinya mengecam agresi terhadap Kashmir dan Palestina cuma bermanis mulut belaka. Negara-negara Barat berderap menginjak Piagam PBB sementara menyerang Afganistan dan Irak, yang juga secara rutin dilakukan negara kerdil Israel. Bagi para penguasa kacung Piagam PBB lebih penting daripada wahyu. Dan mengenai berbagai institusi keuangan seperti IMF dan Bank Dunia, berbagai institusi itu terus digunakan untuk hagemoni ekonomi Barat. Dengan mengikat negeri-negeri Muslim pada badan-badan kolonialis itu, Barat bisa mencampuri urusan-urusan kaum Muslim dan memperoleh dominasi atas kaum Muslim, yang merupakan keharaman menurut Syari'ah. Allah Swt. berfirman,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." [Terjemah Makna Qur'an Surat (4) An-Nisa 141]

Selain itu, dasar dari semua institusi itu adalah sekumpulan piagam dan hukum, yang secara langsung bertentangan dengan peraturan Islam. Jadi, adalah Haram bagi Khilafah untuk berpartisipasi dalam institusi dan organisasi semacam itu. Khilafah akan meluncurkan kampanye kuat untuk mengekspos wajah asli mereka dan mengakhiri hagemoni mereka, sehingga dunia diselamatkan dari kejahatan berbagai institusi itu.

Syariah Islam menentukan berbagai kepentingan negara

Kebijakan luar negeri Khilafah didasarkan pada peraturan Islam. Memenuhi peraturan itu adalah demi kepentingan kaum Muslim. Jadi, tidak seperti hari ini, Khilafah tidak akan meminta cek kosong "kepentingan nasional" untuk menempatkan kaum Muslim dalam penguasaan para kuffar, dengan menyediakan kaum kuffar dengan basis-basis militer, dukungan logistik dan intelijen. Sebaliknya, semua sumberdaya kaum Muslimin akan digunakan untuk memastikan dominasi global oleh Islam.

Politik hari ini membutuhkan urusan-urusan luar negeri yang diatur oleh Islam

Hari ini, urusan-urusan internasional didominasi oleh para kolonialis, negara-negara kapitalis menyuburkan penindasan dan menyengsarakan sekeliling dunia. Negara-negara kolonialis memunculkan berbagai perang untuk mengeksploitasi sumber-sumberdaya dunia dan memperbudak negara-negara di dunia. Kebijakan luar negeri Khilafah tidaklah untuk perolehan material tapi untuk membawa umat manusia dari kegelapan kekufuran menuju cahaya Islam. Allah Swt. berfirman,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."
[Terjemah Makna Qur'an Surat (21) Al-Anbiya 107]



Kebijakan Dalam Negeri

Harmoni di dalam Dunia Muslim

Kewarganegaraan tanpa diskriminasi

Allah Swt. berfirman,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." [Terjemah Makna Qur'an Surat (21) Al-Anbiya 107]

Islam datang sebagai seruan untuk semua manusia, tanpa pandang agama, madzhab, ras atau jenis kelamin. Dalam Khilafah semua warga akan menikmati keuntungan sistem Islam dan perlindungan penuh terhadap nyawa, kepemilikan dan kehormatan mereka tanpa diskriminasi.

Di bawah Islam, non-Muslim dan kaum Muslim hidup bersama selama berabad-abad dalam harmoni. Tiap warga, Muslim maupun non-Muslim, punya hak untuk menyuarakan opininya mengenai kesalahan penerapan Islam atas dirinya atau tindakan tidak adil (Kedzaliman) apapun yang dilakukan terhadap dirinya oleh pemimpin. Ketika Umar bin Al-Khattab r.a. memberitahu orang-orang Kristen bahwa dia tidak akan mampu melindungi mereka melawan orang-orang kristen Romawi dan oleh karenanya akan mengembalikan jizyah, orang-orang Kristen memintanya untuk tetap menyimpan jizyah itu dan lebih lanjut mengatakan bahwa mereka akan berdoa untuk kemenangan melawan para rekan agama mereka sendiri, orang-orang Romawi.

Di abad ke-15, para Yahudi Spanyol yang melarikan diri dari penghukuman zalim di Eropa diajak untuk mendirikan pemukiman, dibolehkan sembahyang di sinagog dan mendapat pengajaran di sekolah agama mereka di dalam Khilafah. Dalam pengobatan, para dokter Yahudi dari sekolah Salanca dipekerjakan sebagai pelayanan dari Khalifah. Dalam industri, banyak tempat pembuatan kaca dan pengerjaan logam didominasi oleh orang-orang Yahudi dan dalam perdagangan, dengan pengetahuan mereka terhadap bahasa-bahasa asing, orang-orang Yahudi Khilafah menjadi kompetitor kompeten bersaing dengan para pedagang Venezia. Dengan demikian, Khilafah adalah contoh berkilau selama berabad-abad keamanan dan harmoni di antara warga.

Khilafah akan membolehkan perbedaan pendapat dan madzhab atas dasar Islam dan tidak akan menimpakan satu madzhab atas yang lain

Perbedaan pendapat hukum Islam di antara madzhab-madzhab, seperti Hanafi, Shafi'i, Hanbali, Ja'fari dan Maliki, diterima sebagai realitas ijtihad. Ketika seorang ahli hukum Islam memahami secara jujur dalil-dalil Islam, dia mungkin menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari ahli hukum Islam lainnya dan ini bukanlah problem. RasulAllah Saw. bersabda,

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

"Ketika seorang hakim melakukan ijtihad dan dia benar, dia mendapat dua pahala. Dan jika dia melakukan ijtihad dan salah dia mendapat satu pahala" (Hadits Riwayat Bukhari)

Meski Khilafah tidak akan mengadopsi perkara-perkara ibadah individual, seperti sholat dan puasa, Khalifah punya hak untuk mengadopsi satu pendapat atas lainnya dalam perkara-perkara negara, berdasarkan kekuatan bukti-bukti dalil. Para Khulafa Rasyidin mencontohkan perkara ini. Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. berbeda pendapat terhadap masalah perceraian, tapi sementara Abu Bakar r.a. adalah Khalifah, dia mengadopsi opininya dan Umar r.a. diwajibkan melaksanakan opini ini atas opininya sendiri. Maka, prinsip dalam Syari'ah,

أمر الإمام يرفع الخلاف

"Perintah Imam mengakhiri perdebatan"

Negara Khilafah bukan negara polisi

Polisi penting untuk memelihara keamanan dan kedamaian internal. Namun, dalam sistem sekarang budaya polisi dan "thana" ("penjara") adalah beban atas rakyat. Alasan untuk "negara polisi" ini bukanlah polisinya sendiri, tapi sistem yang diwariskan oleh para kolonialis. Kolonial Inggris melatih polisi untuk memainkan peran menindas para penduduk Subbenua India, karena mereka tahu bahwa rakyat tidak menerima kekuasaan kolonialis mereka. Ini mirip dengan situasi di Pakistan hari ini, di mana rakyat ingin Islam tapi sistem menerapkan kebijakan-kebijakan kufur melawan mereka.

Rakyat sedang terus menolak sistem karena sistem itu tidak mewakili perasaan, emosi atau konsep mereka, jadi polisi dikerahkan dalam peranan menindas. Selain itu, karena para penguasanya korup, mengejar berbagai kepentingan pribadi mereka sendiri dan melindungi berbagai kepentingan kolonialis, mereka memerlukan kekuatan polisi yang korup yang akan mengamankan penindasan mereka. Para pejabat polisi diberi gaji tipis beberapa ribu rupee, jauh kurang dari yang dibutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka terbuka terhadap suap dan korupsi.

Khilafah akan menjadi sumber kenyamanan bagi polisi juga, karena ia tidak hanya akan memberi mereka pelatihan dan pakaian layak sesuai Islam, ia juga akan menyediakan bagi mereka gaji yang pantas dengan peran penting yang mereka mainkan. Para pejabat polisi akan merasa puas tidak hanya karena bekerja demi keridhoan Allah Swt., dengan mengamankan kehidupan, kepemilikan dan agama kaum Muslimin, mereka juga akan menerima gaji yang pantas mereka dapatkan.

Sistem sekarang mendorong kejahatan, sebaliknya Khilafah akan mengendalikan tingkat kejahatan

Tingkat kejahatan yang meningkat cepat adalah problem yang baginya sistem kapitalis tidak punya solusi, di Pakistan maupun di Barat. Faktanya, nilai-nilai dasar kapitalisme mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Kapitalisme menyediakan semua elemen dasar untuk membentuk pikiran-pikiran kriminal – memisahkan agama dari urusan-urusan dunia mengakibatkan kurangnya rasa takut kepada Allah Swt. dan mengabaikan batasan-batasan yang telah Dia tetapkan, kebebasan pribadi dan nafsu materialistis tak terkendali. Masyarakat yang dibangun di atas konsep-konsep semacam itu

tidak akan mampu mengendalikan kejahatan, apapun kemajuan teknologi yang ada seperti CCTV ataupun tempelan penanda elektronis. Selain itu, dalam sistem sekarang berbagai pengadilan tidak efektif dan polisi korup mendorong kejahatan lebih jauh. Jadi, sistem sekarang tidak akan mampu menanggulangi kejahatan.

Khilafah tidak akan membangun masyarakat di atas konsep-konsep korup kapitalis semacam itu, sehingga mencegah kejahatan sebelum muncul. Ratusan tahun catatan pengadilan dari era Khilafah, yang terpelihara di Timur Tengah hingga hari sekarang, menunjukkan seberapa rendah tingkat kejahatan dahulu. Dalam ratusan tahun hanya beberapa ratus pencuri dihukum dengan memotong tangan mereka, meskipun dalam masyarakat-masyarakat kapitalis masa kini pencurian dan perampokan terjadi setiap beberapa menit. Selain itu, karena merupakan kewajiban bagi Khalifah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar setiap individu, dorongan untuk kejahatan akan ditekan.

Penyatuan Tanah-Tanah Islam

Khilafah adalah sistem persatuan, di mana Maroko di Barat dianggap sama dengan Indonesia di Timur. Ia akan menjadi negara terbesar dan paling banyak sumberdayanya di dunia, insya Allah. Kaum Muslimin diwajibkan hidup dalam satu negara, dan dipimpin oleh seorang Khalifah. RasulAllah Saw. memerintahkan kaum Muslim memberikan bay'ah (sumpah ketaatan) kepada satu Khalifah dalam satu waktu,

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

"Urusan Bani Israel diurus oleh para Nabi. Setiap setelah seorang Nabi meninggal, dia digantikan oleh Nabi yang lain. Tidak ada Nabi setelahku, tapi akan ada para Khulafa. Mereka bertanya, "Apa yang kamu perintahkan pada kami?" Beliau menjawab, "Berikan pada mereka Bay'ah seorang setelah yang lain, karena Allah akan menanyai mereka tentang apa yang telah Dia percayakan pada mereka." (Hadits Riwayat Bukhari)

Segera setelah Khilafah didirikan di satu negeri kuat atau sekumpulan negeri kuat, Khilafah akan menjalankan rencana penggabungan semua negeri Muslim menjadi satu negara. Umat yang bersatu, di bawah satu negara akan punya lebih banyak sumberdaya energi, populasi, tanah dan tentara daripada kekuatan dunia manapun.

Pembebasan Tanah-Tanah Muslim

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

"Sungguh, Khalifah adalah perisai, dari belakangnya kalian bertempur dan olehnya kalian dilindungi" (Hadits Riwayat Muslim)

Deskripsi demikian mengindikasikan manfaat adanya Khalifah, yang ketiadaannya akan mengakibatkan pengabaian Islam dan bahaya atas kaum Muslim. Negara akan bekerja untuk membebaskan semua Tanah Muslim terjajah, Palestina, Kashmir, Iraq maupun Afganistan, dari

penjajahan asing dan akan melawan semua usaha oleh para kaki-tangan internal maupun kekuatan luar yang menggulirkan kekacauan dan kesengsaraan di dalam Tanah-Tanah Muslim.

Khilafah selama berabad-abad mengamankan Tanah-Tanah Muslim. Di bawah Umar bin Al-Khattab r.a., Khilafah menegakkan pengaturan Islam di tanah as-Syam, menyediakan keamanan dan kedamaian bagi Muslim dan non-Muslim. Agresi pasukan salib akhirnya dicampakkan oleh Khilafah, di bawah komandan militer brilian Salahudin. Orang-orang Tartar didepak oleh Khilafah, dengan para wali bertindak dalam ketiadaan Khalifah sebagai pertahanan Tanah-Tanah Islam.

Bahkan dalam periode kelemahannya, Khilafah mengungguli OIC dalam mewakili Umat. Di 1901, Dr. Hertzl memimpin delegasi Zionis yang menawarkan membayar Khilafah untuk memberi tanah di Palestina untuk orang-orang Yahudi, di masa ketika Khilafah disulitkan oleh beban-beban keuangan. Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani menolak untuk bertemu delegasi itu dan menegaskan, “Aku tidak bisa memberikan bahkan serentang-tangan tanah Palestina, karena ia bukan milikku tapi ia milik Umat Islam. Rakyatku berperang untuk tanah ini dan mengirigasinya dengan darah mereka, jadi biarkan orang-orang Yahudi menyimpan jutaan uang mereka. Namun, jika negara Khilafah dipecah-belah suatu hari, maka mereka bisa mengambil Palestina tanpa harga.”

Dan betapa benar, negara Zionis hanya tercipta setelah Khilafah dihancurkan pada 28 Rajab 1342 H, 87 tahun hijri yang lalu.

Bahkan para pemimpin korup dipaksa melayani Islam, karena sistemnya mengikat mereka untuk menerapkan Islam. Ketika Raja Dahir melukai kaum Muslim di Subbenua India, Hajaj bin Yusuf mengirim Muhammad bin Qasim bersama pasukan sebagai responnya, oleh karenanya membuka tanah subbenua itu untuk Islam.



Kebijakan Pendidikan

Menjadi standar dunia dalam pendidikan

Pendidikan untuk semua

Hari ini, terdapat struktur pendidikan dua-lapis, satu untuk elit dan satunya untuk massa. Sebaliknya, pendidikan dalam Khilafah akan menjadi standar dunia terdepan bagi setiap warga, tanpa pandang keyakinan, madzhab, jender atau ras.

Dalam perkara pendidikan, RasulAllah Saw. menjadikan tebusan bagi para kafir tahanan perang adalah mengajar sepuluh anak Muslim, di mana para tahanan perang statusnya adalah milik kaum Muslim. Adalah kewajiban atas negara untuk mengajari setiap individu hal-hal yang dibutuhkan untuk kehidupan umumnya. Khilafah akan memastikan bahwa terdapat pendidikan gratis di tingkat dasar dan lanjutan bagi semua warganya. Selain itu, Khilafah akan menyediakan pendidikan tinggi gratis yang terbaik yang dimampui.

Membangun kepribadian Islam

Negara Khilafah akan menetapkan Islam sebagai satu-satunya dasar bagi keyakinan, nilai-nilai, konsep-konsep dan kecenderungan dalam diri anak. Kurikulum dan metode mengajar didesain untuk mencegah penyimpangan dari dasar ini. Semua sekolah publik maupun swasta akan patuh pada kurikulum ini. Oleh karena itu, semua pelajaran dalam kurikulum harus berakar dari dasar ini. Allah Swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" [Terjemah Makna Qur'an Surat (66) At-tahrim 6]

Menumbuhkan para ahli dalam setiap bidang kehidupan

Khilafah akan memastikan bahwa para warganya menjadi para ahli dalam setiap ranah kehidupan. Pengetahuan akan menjadi dua cabang – ilmu Islam dan sains empiris. Mengenai ilmu Islam anak-anak akan menjadi fasih dalam pelajaran-pelajaran seperti Ijtihad, Fiqih dan tafsir.

Mengenai sains empiris, Khilafah akan memastikan bahwa putra-putri Muslim cakap dalam pelajaran-pelajaran seperti perekayasaan, kimia, fisika dan medis. RasulAllah Saw. bersabda,

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

"Kalian lebih tahu dalam perkara-perkara dunia." (Hadits Riwayat Muslim)

Jadi, Umat yang sama yang menumbuhkan para pemimpin dalam bidang politik, pemerintahan dan jihad seperti Abu Bakar r.a., Khalid bin Walid r.a. dan Salahudin adalah Umat yang sama yang menumbuhkan para ahli luar biasa dalam fiqh dan sains seperti Imam Abu Hanifah dan Al-Khawarizmi.

Pelajaran bahasa

Bahasa Arab adalah elemen fundamental untuk keajaiban al-Qur'an, kaum Muslimin mengibadahi Allah Swt. melalui membaca al-Qur'an dalam Bahasa Arab. Ayat-ayat wahyu ada dalam Bahasa Arab maka ahli hukum tidak bisa menentukan hukum tanpa pengetahuan Bahasa Arab. Bahasa Arab akan menjadi bahasa negara.

Bahasa-bahasa asing akan diajarkan untuk tujuan membawa seruan Islam kepada umat manusia dan mengurus berbagai urusan kaum Muslim melalui penerjemahan teks-teks berguna, seperti karya-karya riset teknik.

Metode mengajar untuk memicu kecerdasan dan perilaku luhur

Belajar dengan mengulang-ulang dan menghafal dalam sistem Pakistan sekarang mengkerdilkan kecerdasan para siswa, karena itu tidak terhubung ke realitas yang para siswa indera secara langsung atau yang bisa dibayangkan. Metode mengajar dalam Islam akan merupakan pemberitahuan rasional oleh guru dan pemahaman intelektual oleh siswa.

Para guru akan dilatih untuk menunjukkan pada para siswa dengan cara yang memastikan diskusi berdasarkan proses berpikir. Semua indera akan dilibatkan, sehingga siswa bisa dengan mudah memperoleh banyak konsep.

Di mana berbagai pemikiran terkait dengan pandangan hidup Muslim terhadap kehidupan, guru akan berusaha mengembangkan perasaan-perasaan siswa, sedemikian rupa sehingga suka dan bencinya menurut dengan Islam. Ini membuat lebih mudah bagi siswa untuk bertindak berdasarkan apa yang telah diwahyukan.

Di mana berbagai pemikiran tidak berkaitan dengan pandangan tertentu seperti fisika, matematika dan kimia, itu akan diajarkan dan dipelajari untuk menghasilkan manfaat untuk Umat, untuk keridhoan Allah Swt.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

"Dan carilah negeri akhirat melalui apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari duniawi" [Terjemah Makna Qur'an Surat (28) Al-Qashash 6]

Pendidikan Tinggi

Tujuan bagi pendidikan tinggi adalah untuk menumbuhkan para pemimpin kompeten Umat, yang akan melindungi Islam, menerapkan dan membawanya ke seantero dunia dan juga mengamankan negara dari berbagai ancaman asing dan pemecahbelahan.

Pendidikan tinggi bersasaran memproduksi para peneliti yang berkemampuan inovasi dalam metode teknis dan kreasi dalam pertanian, air, keamanan, kesehatan dan berbagai kepentingan vital lainnya memungkinkan Umat mengendalikan urusan-urusannya menurut visinya dan kemandiriannya sendiri. Ini akan mencegah kebergantungan pada para kolonialis kuffar dalam urusan-urusan kaum Muslim.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

"Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." [Terjemah Makna Qur'an Surat (4) An-Nisa' 141]

Pendidikan tinggi akan memastikan kecukupan jumlah dokter, manajer, akuntan, insinyur, guru, hakim dan ahli hukum untuk mengamankan kebutuhan-kebutuhan kaum Muslim. Khilafah akan mendirikan berbagai institusi teknik, akademi pelayanan sipil, universitas, pusat riset dan pengembangan dan akademi militer.

Pendidikan tinggi dalam semua disiplin ilmu akan menjaga spesialisasi dalam mempelajari Islam. Ini di atas semua yang lain akan membuat pemimpin masa depan menjadi jujur pada rakyat dalam apapun yang dia harapkan untuk dilakukan berupa pemerintahan, perdagangan maupun pengajaran.



Tentang Hizb ut Tahrir

Alasan-alasan pendirian

Hizb ut Tahrir adalah partai politik yang ideologinya adalah Islam. Hizbut Tahrir didirikan dalam memenuhi seruan Allah Swt.,

وَلْتَكُنْ مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan (Islam), menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; Dan merekalah orang-orang yang beruntung." [Terjemah Makna Qur'an Surat (3) Ali Imran 104]

Sasaran Hizb ut Tahrir

Sasaran Hizb ut Tahrir (Partai Pembebasan) adalah untuk membebaskan umat dari dominasi berbagai pemikiran, sistem dan negara kufur, dengan melanjutkan kehidupan Islam dan untuk mengemban dakwah Islam kepada dunia. Tujuan ini artinya membawa kaum Muslim kembali menjalani kehidupan Islam dalam Dar-ul-Islam, satu negara Islam dan satu masyarakat Islam, sehingga semua urusan kehidupan ditentukan oleh Islam dalam negara Khilafah, ini menjadi satu-satunya metode membangkitkan Umat.

Keanggotaan dalam Hizb ut Tahrir

Hizb menerima semua Muslim laki-laki dan perempuan sebagai anggotanya, tanpa pandang ras, bahasa atau madzhab. Metode afiliasinya adalah mereka memeluk keyakinan Islam dan adopsi mereka terhadap konsep partai, yang digali dari Islam semata-mata.

Kumpulan para wanita terpisah dari kumpulan para pria dan dibina oleh para wanita lainnya, suaminya atau mahramnya (para kerabat yang tak boleh dinikahi).

Kerja Hizb ut Tahrir

Hizb ut Tahrir adalah partai yang ideologinya Islam. Islam diwahyukan untuk mengurus urusan-urusan manusia. Islam datang untuk mengurus urusan-urusan rakyat, menyediakan hukum-hukum untuk mengatur hubungan dalam semua ranah, dalam pemerintahan, ekonomi, pendidikan maupun kebijakan luar negeri. Hizb ut Tahrir sedang bekerja untuk mengubah secara radikal situasi rusak masa ini dengan mendirikan Islam sebagai dasar satu-satunya untuk mengurus urusan-urusan umat manusia, yang hanya mungkin melalui pendirian-kembali Khilafah.

Hizb ut Tahrir mengikuti metode yang digunakan oleh RasulAllah Saw. untuk mendirikan Negara Islam yang pertama di Madinah Munawarrah.

Oleh karenanya Hizb ut Tahrir melakukan perjuangan intelektual melawan berbagai pemikiran dan konsep rusak, yang menjadi dasar dan yang terus dipromosikan sistem kapitalis. Hizb mengungkap kesalahan, kerusakan dan kontradiksi mereka dengan Islam di hadapan Umat. Jadi, Hizb secara kuat membantah konsep-konsep demokrasi, patriotisme, sosialisme dan kapitalisme dan dalam

melakukannya tidak pernah beralih ke bermanis mulut, kompromi atau akomodasi. Faktanya, Hizb dengan kuat menantang konsep apapun yang bertentangan dengan Islam.

Bersamaan dengan pemurnian intelektual ini, Hizb ut Tahrir melibatkan diri dalam perjuangan politik. Jadi, Hizb ut Tahrir meminta pertanggung-jawaban, menantang dan mengekspos para penguasa kacung, mengungkap kolaborasi mereka dengan para kolonialis yang mengabaikan Islam dan kaum Muslim.

Dengan demikian, semua aksi Hizb ut Tahrir adalah politis, karena politik dalam Islam adalah mengurus urusan-urusan umat dalam arti yang sebenarnya. Apapun selain ini hanyalah penceramahan atau pengajaran.

Sasaran tindakan-tindakan politiknya adalah untuk membebaskan kaum Muslim dari berbagai konsep dan perasaan yang rusak dan kufur. Hizb ut Tahrir berusaha memastikan bahwa pemikiran Islam membentuk opini publik, menggerakkan umat untuk bertindak berdasarkan itu dan menerapkannya. Hizb juga mengusahakan perasaan-perasaan kaum Muslim, sehingga mereka mencintai apa yang diridhoi Allah Swt. dan membenci apa yang tidak diridhoi Allah Swt. Hizb bekerja untuk menegakkan hubungan-hubungan Islam dalam masyarakat secara keseluruhan. Jadi, Hizb menjadi wakil alami Umat untuk penerapan Islam.

Adalah terbukti dari metode yang digunakan oleh RasulAllah Saw. bahwa mengubah berbagai pemikiran dan perasaan yang dominan tidaklah cukup untuk menegakkan Islam, akan tetapi harus juga ada pencarian dukungan material fisik (Nussrah) dari para ahli kekuatan dalam rangka menegakkan Islam sebagai kekuasaan. Bersamaan dengan menyeru manusia secara umum, Hizb menyeru para ahli kekuatan khususnya untuk memenuhi peran mereka dengan menyingkirkan para penguasa antek dan memberikan Nussrah kepada Hizb ut Tahrir untuk mendirikan Khilafah.

Ini adalah alasan mengapa para kekuatan kolonialis memerintahkan para penguasa kacung untuk menggunakan tindakan keras untuk melawan dakwah Islam ini. Para penguasa tiran telah mencoba semua cara penindasan atas para anggota Hizb, dari penyiksaan, pemenjaraan, pembuangan dan tidak memberi pekerjaan. Mereka bahkan telah men-syahid-kan para anggota Hizb di Irak, Syria, Libya dan Uzbekistan.

Kaum Kuffar sedang terus bekerja untuk berusaha dan mencegah pertumbuhan seruan Hizb ut Tahrir. Mereka telah mengadakan berbagai konferensi dan seminar untuk menangani Hizb ut Tahrir dan Khilafah, semacam konferensi Ankara oleh Amerika. The Heritage Foundation, Nixon Institute, International Crisis Group dan CIA semua telah mempublikasikan berbagai laporan tentang Hizb ut Tahrir. Negara-negara kafir bersikeras atas pelarangan Hizb ut Tahrir meskipun Hizb adalah satu partai politik, yang tidak menggunakan perjuangan fisik.

Meski semua halangan itu, Hizb ut Tahrir menyandarkan diri pada Allah Swt. dalam mengejar jalannya dengan keteguhan, komitmen penuh dan ketulusan. Karena hanya Allah Swt. saja yang akan menganugerahi Umat dan Hizb-nya dengan kesuksesan, wibawa dan dukungan material fisik ketika Allah Swt. berkehendak. Insya Allah, hari itu tidaklah jauh dan pada hari itu orang-orang beriman akan bersuka-cita dengan pertolongan Allah Swt.

Model rancangan Khilafah

Hizb telah menyiapkan harta pengaturan luas, yang menggariskan Khilafah yang akan segera datang dengan izin Allah Swt., sebagian kecilnya digunakan untuk menyiapkan manifesto ini. Buku-buku itu termasuk;

Struktur Negara Khilafah

Sistem Pemerintahan

Sistem Ekonomi

Sistem Keuangan Negara Khilafah

Kebijakan Ekonomi Ideal

Sistem Peradilan

Aturan-Aturan Pembuktian

Pendahuluan Konstitusi

Buku-buku itu tersedia online dari website kami www.hizb-ut-tahrir.org



Sejarah singkat Hizb ut Tahrir

Hizb ut Tahrir didirikan pada tahun 1953 M/ 1372 H oleh Syeikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhany, seorang ulama yang meraih level mujtahid mutlaq, seorang hakim Mahkamah Banding di al-Quds dan seorang politisi ulung. Rumahnya adalah rumah pengetahuan karena ibunya dan bapaknya adalah ahli hukum. Selain itu, kakek buyutnya Syeikh dari jalur ibu adalah Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad An-Nabhany As-Syafii, Abu Al-Mahasin, ahli bahasa, penyair dan seorang hakim terkemuka dalam Khilafah.

Setelah kematian An-Nabhani di tahun 1977 M/ 1396 H, asistennya, Syeikh Abdul Qadim Yusuf Zalloum menjadi Amir. Dengan taufiq Allah Swt., dia mengokohkan Hizb di mana ribuan dari ribuan orang ada di dalamnya dan mengemban pemikiran-pemikirannya dan dengan jutaan pendukungnya. Hizb bekerja di seantero Tanah-Tanah Muslim, di lebih dari 40 negara, dan merupakan partai terbesar di dunia yang bekerja untuk tegaknya Khilafah.

Amir yang sekarang, Syeikh Ata Abu Rushta, mengambil tanggung jawab di tahun 2003 M/ 1424 H. Seorang berpendidikan insinyur, dia telah aktif di dalam Hizb sejak usia sangat muda. Dia dahulu asisten Syeikh Zalloum dan seorang juru bicara terkemuka untuk Hizb di Yordania. Syeikh Ata telah dikurung penjara-penjara para penguasa tiran beberapa kali dan ditetapkan oleh Amnesty International sebagai “tahanan keyakinan”.

Di tahun-tahun sekarang, Hizb ut Tahrir telah menjadi semakin kokoh di dalam Umat. Di 2007, Hizb mengadakan konferensi yang terbesar dalam bidang kebangkitan Khilafah di Indonesia, dengan 100.000 hadirin serta banyak para peserta di luar gedung.



Seruan Hangat dari Hizb ut Tahrir Wilayah Pakistan

Pada 28 Rajab 1342 H, bertepatan 3 Maret 1924, Inggris kafir dengan anteknya, Mustafa Kamal, menghapus Khilafah di Istanbul, yang membuka pintu bagi dominasi kolonialis atas tanah-tanah Muslim. Para kafir kolonialis memecah-belah Tanah-Tanah Muslim, merobeknya hingga lebih dari 50 potongan, dan di tiap potongan mereka menetapkan seorang penguasa antek, yang mereka perintah dan larang dan yang tunduk kepada mereka sepenuhnya. Penghambaan kepada kafir sekarang telah dilindungi dalam tiap konstitusi, jadi pergantian-pergantian wajah semata tidaklah mengubah situasinya. Para penguasa melakukan tawar-menawar dengan kekayaan dan sumberdaya Umat demi singgasana mereka dan menerapkan sistem yang mengamankan berbagai kepentingan kaum kafir.

Sejak penghancuran Khilafah, Umat telah dijangkiti seabrek bencana.

Setelah penghancuran Khilafah, Inggris memberi orang-orang Yahudi satu negara di tanah yang diberkahi Palestina, tanah Isra dan Mi'raj RasulAllah Saw. Inggris juga memberi orang-orang Hindu segepok Subbenua India, menyisakan untuk kaum Muslim daerah yang lebih miskin, meskipun kaum Muslim telah menguasai wilayah itu dengan cahaya Islam selama ratusan tahun.

Inggris memastikan bahwa Kashmir tetap menjadi "luka berdarah" di sisi Umat, di mana orang-orang Hindu telah menindas kaum Muslim selama berpuluh tahun.

Russia telah membuat syahid dan mengusir ribuan kaum Muslim di Asia Tengah dan bahkan sekarang Rusia meneruskan penindasan kejinya di Chechnya.

Amerika atas nama "Perang melawan Teror," telah menjajah Tanah-Tanah Muslim Irak dan Afganistan, menodai para wanita Muslim dan menjadikan kaum muda dan tua syahid.

Sungguh, kampanye permusuhan kaum kafir telah mencapai tingkat di mana mereka secara terbuka menyerang keimanan kaum Muslim, ketika mereka menghina RasulAllah Saw. dan membuat film-film pelecehan terhadap al-Qur'an.

Wahai Kaum Muslimin!

Ini adalah keadaanmu setelah penghancuran Khilafah. Ini adalah kondisi memalukan dan kehinaan, di mana negara-negara saling memanggil untuk melawanmu. Kalian didominasi oleh pengaruh para kafir kolonialis, yang telah difasilitasi oleh para penguasa yang ditimpakan atasmu oleh Barat. Kita telah menjadi jarahan bagi setiap negara rakus, ambisius. Negeri-negeri kita telah menjadi arena bagi tiap negara yang bersaing. Kaum Muslim telah menjadi orang asing di negerinya sendiri, di mana dia dikejar, ditangkap dan dijadikan syahid dengan penyiksaan karena dia menyatakan Tuhanku adalah Allah. Dakwah untuk Khilafah adalah suatu kejahatan besar yang untuk itu dia dikejar di dalam negeri-negeri Muslim dan non-Muslim.

Tanpa ragu, jalan satu-satunya untuk pembebasan dari situasi parah saat ini adalah pendirian Khilafah. Kalian mengalami semua bentuk sistem, dari demokrasi hingga kediktatoran dan semua yang ada di antaranya, namun tidak ada yang membela dan memenuhi urusan-urusanmu. Kalian telah menaruh kepercayaan pada banyak kepemimpinan politik, tapi tidak ada yang mengeluarkanmu dari kejahatan para kolonialis. Ini adalah saatnya bahwa kalian bergerak untuk satu

sistem yang telah ditetapkan untukmu oleh Tuhanmu Swt. Ini adalah saat yang tepat bagimu untuk bergabung dengan barisan-barisan mereka yang berjuang untuk memastikan bahwa urusan-urusanmu ditangani oleh Islam melalui pendirian negara Khilafah. Sungguh, Hizb ut Tahrir sedang berjuang sesuai metode Kenabian bagi kembalinya Khilafah Rasyidah, Khilafah akan menjadi pemancar cahaya bagi seluruh dunia. RasulAllah Saw. telah memberi berita gembira kembalinya Khilafah Rasyidah yang ber-manhaj Kenabian, setelah kekuasaan opresif yang kita hadapi sekarang. Dalam hadits shahih yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dari Hudzaifah bin al-Yaman r.a., RasulAllah Saw. bersabda,

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ

"Kenabian akan terus ada bersama kalian selama Allah kehendaki untuk tetap ada. Lalu akan ada Khilafah sesuai Metode Kenabian, dan keadaan akan sebagaimana Allah kehendaki. Lalu Allah akan mengakhirinya ketika Dia berkehendak. Lalu akan ada kekuasaan kerajaan, dan keadaan akan sebagaimana Allah kehendaki. Lalu Allah akan mengakhirinya ketika Dia berkehendak. Lalu akan ada kekuasaan penindas, dan keadaan akan sebagaimana Allah kehendaki. Lalu Allah akan mengakhirinya ketika Dia menghendaki. Lalu akan ada Khilafah sesuai Metode Kenabian." Lalu beliau Saw. diam."

Tanpa keraguan ini adalah sumber penjaminan Khilafah akan kembali, dengan izin Allah Swt., dan lebih cepat dari yang orang kira. Namun, kita harus ingat bahwa Allah Swt. tidak akan mengutus para malaikat untuk mendirikan Khilafah, akan tetapi ini membutuhkan usaha tulus dan teguh oleh kaum Muslimin yang mencari Keridhoan Allah Swt. saja.

Sedangkan bagi mereka yang beramal demi berbagai kepentingan pribadi, posisi, dan ketundukan pada kaum kafir, yang menentang pengusahaan Khilafah, tidak lama mereka akan harus meninggalkan singgasana dan mahkota mereka, dihinakan dan dinistakan dan situasi mereka akan sebagaimana Allah Swt. deskripsikan,

{ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ } { وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ } { وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ } { كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ } { فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ }

"Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan, dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah, dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya, demikianlah. Dan Kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak diberi tangguh." [Terjemah Makna Qur'an Surat (44) Ad-Dukhan 25-29]

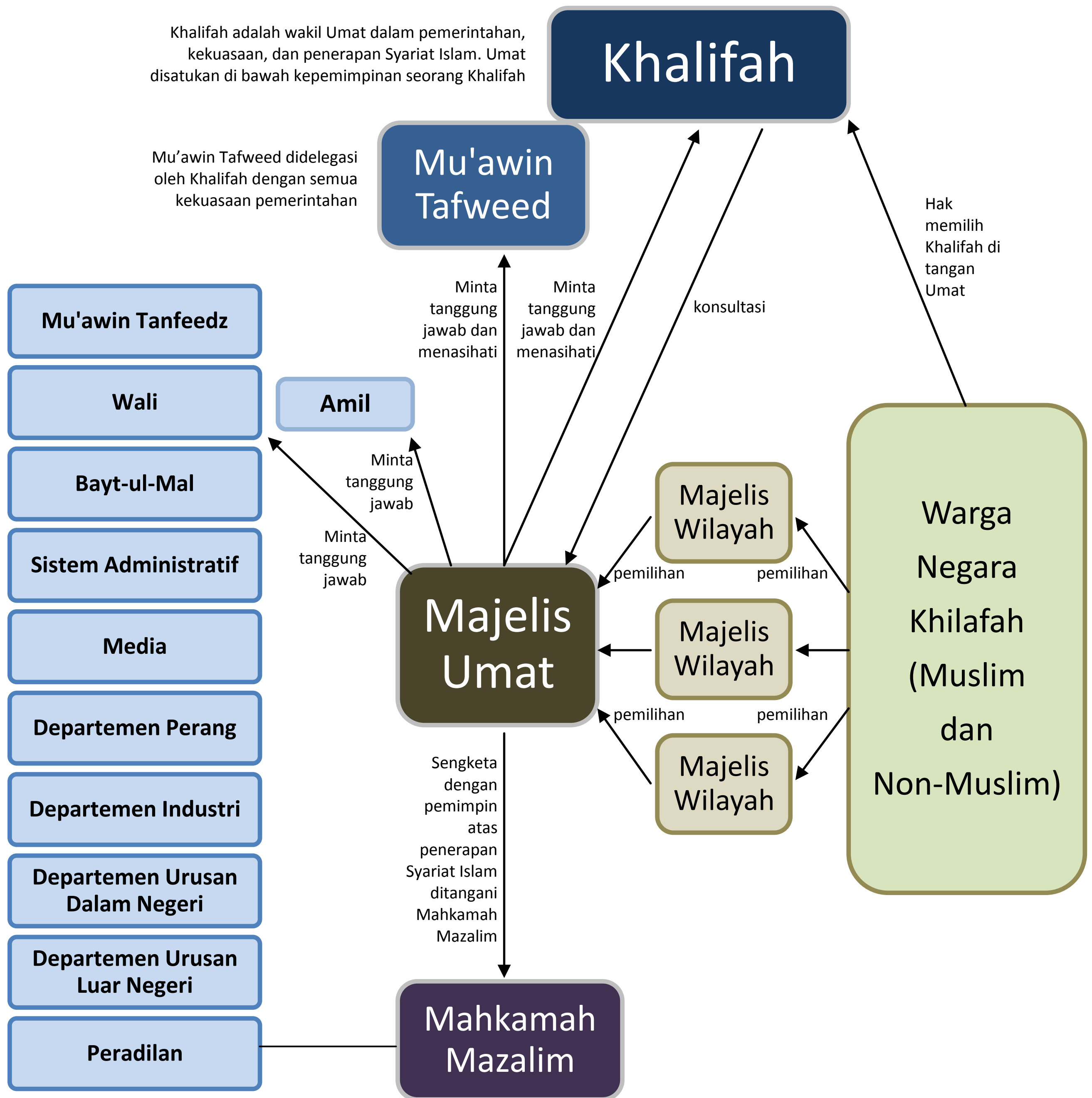
Hizb ut Tahrir menyerumu untuk bergabung dengannya dalam gerakan untuk mendirikan Khilafah. Tidaklah sulit mengikuti kerja ini, yang harus kamu lakukan adalah menjawab ke anggota Hizb ut Tahrir yang membawa seruan kepadamu atau menghubungi kantor media kami. Dan ini menyeru angkatan bersenjata Muslim untuk memberi Hizb ut Tahrir Nussrah (Dukungan Material Fisik) sehingga Khilafah didirikan. Jadi, bergegaslah untuk memenuhi kewajiban besar bekerja untuk mendirikan Khilafah, sebelum ia didirikan dan kamu tidak mendapat pahalanya! Keputusan ada di tanganmu, jadi kapan kamu akan menjawab?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu" [Terjemah Makna Qur'an Surat (8) al-Anfal 24]



Struktur Negara Khilafah



Mu'awin Tanfeedz melaksanakan keputusan Khalifah dan melaporkan kemajuan

Wali punya semua kekuasaan pemerintahan atas satu Wilayah kecuali tentara, peradilan dan keuangan

Baitul Mal menangani pengumpulan pendapatan dan pengeluaran menurut Syariah

Sistem Administratif termasuk departemen kesehatan, pendidikan, pertanian dll. Setiap direktur departemen bertindak menurut instruksi Khalifah

Di dalam negeri, Media berkontribusi pada atmosfer kuat Islam dan di luar negeri mempropagandakan kebesaran Islam dan membeberkan penindasan dan kerusakan oleh kaum kafir

Departemen perang memastikan pelatihan militer dan Islam angkatan bersenjata. Tiap pria Muslim di usia 15 tahun harus diberi latihan Jihad, karena militer memenuhi kewajiban kesiapan

Khilafah akan memperbanyak industri berat dan mendirikan kemandirian industri. Industri dalam Khilafah melengkapi Jihad dan Khilafah akan memproduksi persenjataan modern

Departemen dalam negeri menangani semua perkara terkait kedamaian dan keamanan dalam negeri

Dasar kebijakan luar negeri adalah mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia dan menjadikannya dasar hubungan dengan negara-negara lain

Para hakim harus Muslim, merdeka, berakal dan baligh serta adil dan ahli hukum Islam; Hakim Mazalim harus laki-laki dan mujtahid

Pakistan, Khilafah dan penyatuan-kembali Dunia Muslim

Meskipun secara keseluruhan memiliki lebih banyak daratan, lautan, tentara, sumberdaya material dan pemuda dan pemudi berkemampuan daripada negara lain di muka bumi, kaum Muslimin dalam keadaan terpecah-belah ke dalam lebih dari 60 negara, dengan kurang kemampuan dan kendali atas urusan-urusan mereka daripada negara-negara yang sangat kecil yang mereka sulit dilihat di peta dunia.

Pakistan bukanlah pengecualian. Meskipun memiliki angkatan bersenjata terbesar ke-7, kapabilitas nuklir, populasi terbesar ke-6 dunia, pertanian kaya dan beragam, sumber-sumberdaya mineral besar, ia dalam keadaan tunduk pada kemauan para kolonialis, tidak mampu memenuhi potensi riilnya.

Masalah mendasar yang menjangkiti Umat hari ini adalah bahwa kedaulatan Allah Swt. tidak ditegakkan dalam kehidupan kaum Muslimin. Sungguh, jika satu atau lebih negeri Muslim muncul sebagai negara Khilafah di mana Islam diimplementasikan, ini akan menjadi titik awal yang kuat bagi penyatuan-kembali seantero Dunia Muslim sebagai negara terkuat dunia.

Dalam manifesto ini, Hizb ut Tahrir Wilayah Pakistan menggariskan satu visi tentang apa yang akan Khilafah bawa untuk Pakistan dan seluruh Dunia Muslim. Hizb ut Tahrir menyeru kaum Muslim untuk bergabung dengannya dalam gerakan untuk mendirikan Khilafah. Dan ia menyeru angkatan bersenjata kaum Muslim untuk memberi Hizb ut Tahrir Nussrah (Dukungan Material Fisik) sehingga Khilafah didirikan.

http://www.hizb-pakistan.org

